



PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN



○ ○ ○ ○

RENCANA STRATEGIS
RENSTRA
DINAS KESEHATAN
2025-2029



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
Jl. Jatayu No.4 Kota Pekalongan 51114, Telp. (0285) 421972
dinkes_ktpekalongan@yahoo.com / dinkes@pekalongankota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan kehendak-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 selesai disusun. Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai bagian dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreativitas, inovasi dan kemampuan Kota Pekalongan.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lima tahun ke depan tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin dan akuntabel. Oleh karena itu, besar harapan saya bahwa strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra ini dapat menjadi acuan sekaligus sebagai tolok ukur kinerja semua pihak, sehingga Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan kurun waktu lima tahun dalam rangka " **Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah**" dapat terealisasi.

Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, kami ucapkan terima kasih, semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Pekalongan, 19 September 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN

Dr. Slamet Budiwanto, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan	12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	12
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	42
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan.....	50
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	56
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan	62
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan	62
2.2.2 Isu Strategis	67
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 2025-2029.....	71
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan 2025-2029	71
3.3 Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029	73
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029	75



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	Uraian Program	77
4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	77
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	131
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama Pembangunan	134
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan	135
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	136
4.7	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	138
4.8	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi	140
BAB V	PENUTUP	145



DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025	43
Tabel II-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan	44
Tabel II-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, UPTD dan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025	46
Tabel II-4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah	48
Tabel II-5	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Swasta	48
Tabel II-6	Jenis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat	49
Tabel II-7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	51
Tabel II-8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	55
Tabel II-9	Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	56
Tabel II-10	Keterkaitan Masalah Pokok dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Masalah dan Akar Masalah	65
Tabel II-11	Isu Strategis	69
Tabel III-1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan	72
Tabel III-2	Strategi Renstra Dinas Kesehatan	73
Tabel III-3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan	75
Tabel IV-1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan	82
Tabel IV-2	Daftar Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	131
Tabel IV-3	Indikator Utama Pembangunan	134
Tabel IV-4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan	135
Tabel IV-5	Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan	136
Tabel IV-6	Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan	138
Tabel IV-7	Indikator SDG's	140
Tabel IV-8	Indikator Stunting	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.....	4
Gambar I-2	Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi	5
Gambar II-1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.....	20
Gambar II-2	Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.....	24
Gambar II-3	Struktur organisasi UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu	28
Gambar II-4	Struktur organisasi UPT Puskesmas.....	31
Gambar II-5	Struktur Organisasi RSUD Bendan	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah teridentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya yang telah diterbitkan, terlihat bahwa pemerintah (pusat) telah berupaya dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa "Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86



Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai salah satu Institusi Teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Pekalongan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya.

Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

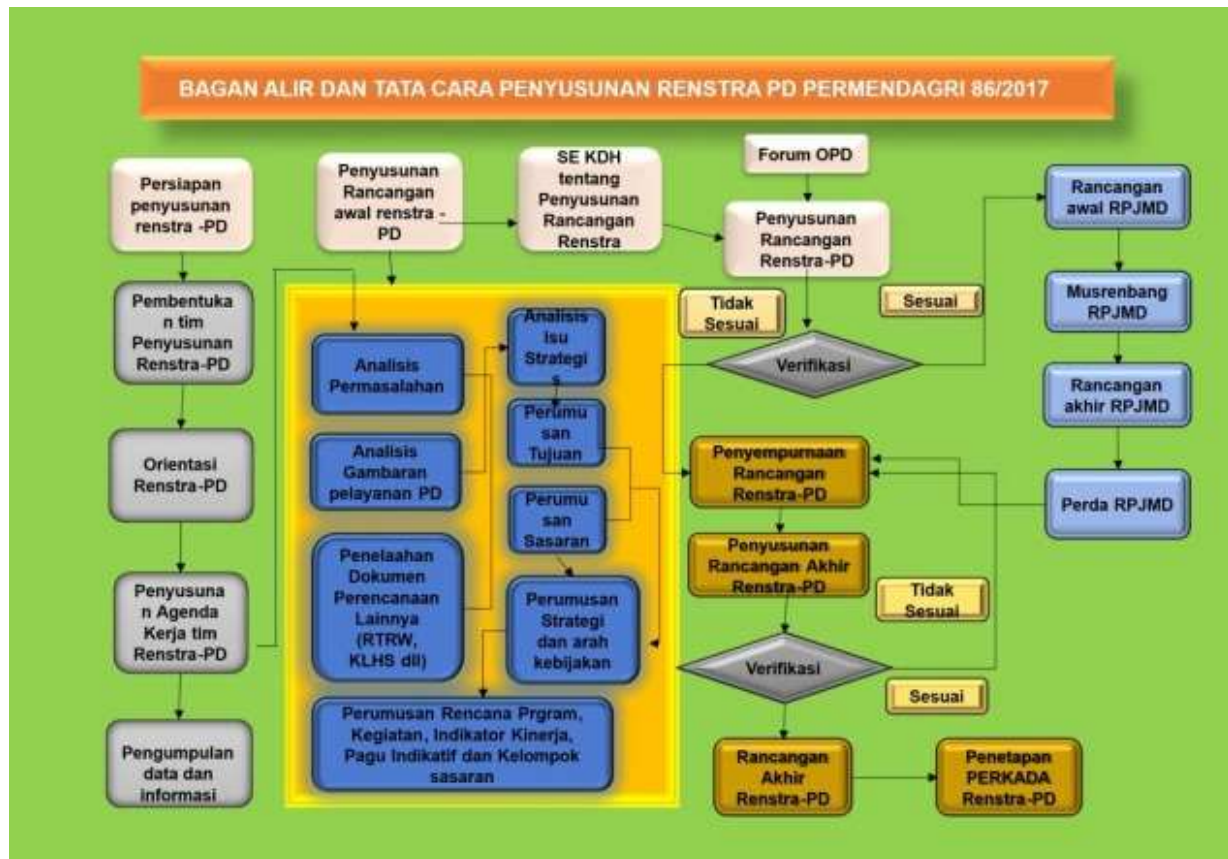


Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan pembangunan di Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya.

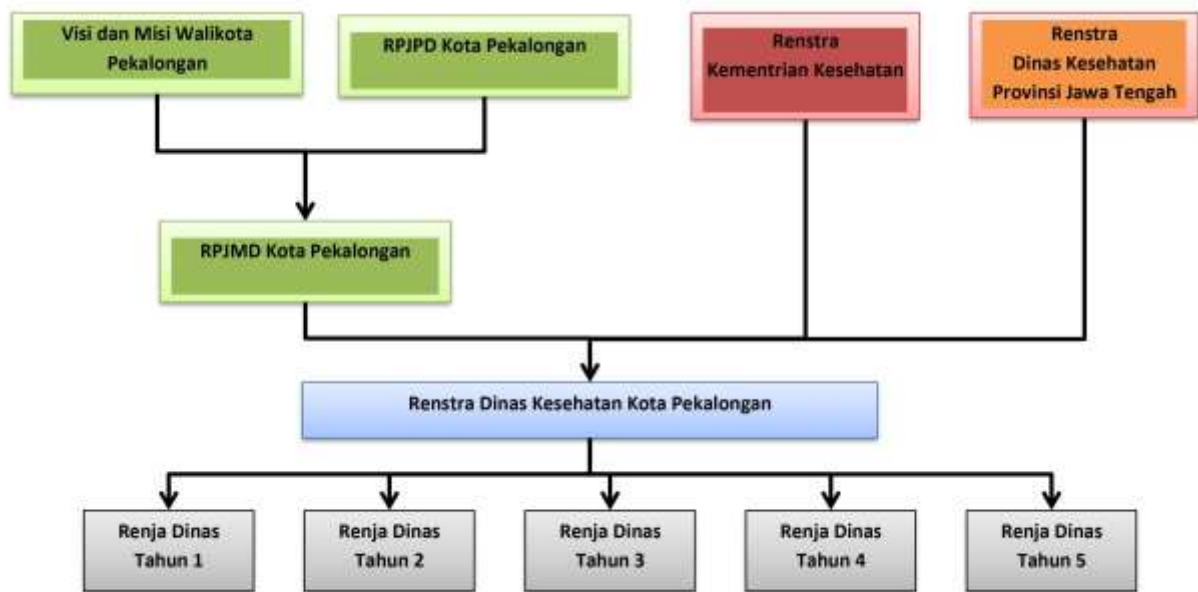
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut tujuan dan sasaran strategis RPJMD dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar I-1 berikut ini :



Gambar I-1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra tahun 2025–2030 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mengacu kepada RPJMD Kota Pekalongan dan memperhatikan Renstra Kementerian Kesehatan serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tersebut selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar I-2 berikut ini :



Gambar I-2 Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Pada akhirnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2025–2029. Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang kesehatan dalam periode Tahun 2025–2029 sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 20025-2045 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 30);
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
22. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 85).



1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan harmonis serta berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan kesehatan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan wajib pelayanan dasar dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kesehatan.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025- 2029.
- d. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dan mengulas tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaahan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ditinjau dari telaahan Renstra Kementerian Kesehatan, telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah dan strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kesehatan periode 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



Bab ini berisi tentang indikator kinerja, rencana program dan kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk periode 2025 – 2029 serta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam periode 2025 - 2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pekalongan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan substansi, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Dinas Kesehatan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.1.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26). Serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tertuang dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- c. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melaksanakan fungsi:
 - 1) Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang kesehatan;
 - 2) Perumusan kebijakan bidang kesehatan;
 - 3) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pelayanan kesehatan;
 - 4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
 - 5) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;



- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD;
- 8) Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- 9) Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Unit Organisasi Bersifat Khusus yaitu RSUD Benda Kota Pekalongan;
- f. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yaitu UPT Puskesmas se Kota Pekalongan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Sub Bagian adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

1) Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

2) Fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;



- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang kesehatan per semester;
- j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
 - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;



- c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
 - d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - f. melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
 - h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - i. mengelola data dan informasi;
 - j. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang kesehatan;
 - k. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
 - e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;



- f. mengelola penyusunan laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

B. Bidang Pelayanan Kesehatan

1) Tugas:

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pelayanan kesehatan.

2) Fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pelayanan kesehatan;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pelayanan kesehatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah;
- e. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- f. penyelenggaraan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah;
- g. pengoordinasian penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1) Tugas:

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di



bidang sumber daya kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

2) Fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang sumber daya kesehatan, farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
- d. pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di daerah;
- e. penyelenggaraan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di daerah;
- f. penyelenggaraan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah;
- g. penyelenggaraan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
- h. penyelenggaraan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- i. penyelenggaraan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
- j. penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
- k. penyelenggaraan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
- l. penyelenggaraan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga;



- m. pengoordinasian penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang kesehatan;
- n. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Tugas:

Menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit.

2) Fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah;
- e. penyelenggaraan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah;
- g. penyelenggaraan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah;
- h. pengoordinasian penerapan dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Kesehatan;



- i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

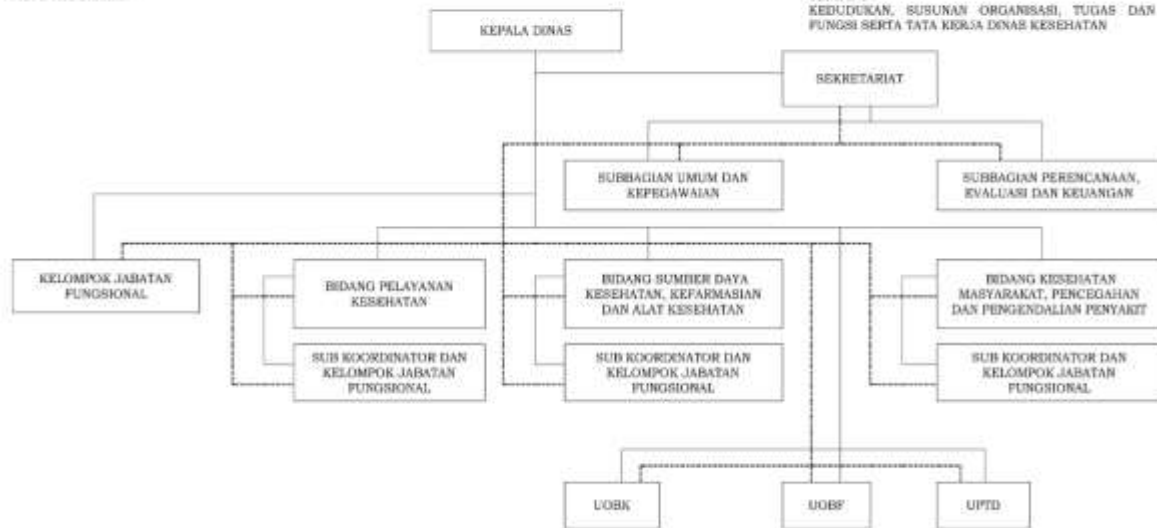
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi dua Kepala Sub Bagian:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
- d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- e. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 85 Tahun 2021 sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 83 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN



Gambar II-1 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan, 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UOBF) yang terdiri dari 14 (empat belas) UPT Puskesmas, yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kesehatan. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 pasal 21 maka 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A

Kedudukan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu di bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Klinik. Dalam melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan fungsi:



- a. pelayanan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pemeriksaan secara bakteriologi;
 - b) pemeriksaan secara fisika;
 - c) pemeriksaan secara kimia; dan
 - d) pemeriksaan makanan dan minuman.
- b. pelayanan teknis operasional laboratorium klinik, antara lain:
 - a) pemeriksaan darah rutin;
 - b) pemeriksaan kimia klinik;
 - c) pemeriksaan serologi dan imunologi;
 - d) pemeriksaan mikrobiologi;
 - e) pemeriksaan parasitologi; dan
 - f) pemeriksaan bebas narkoba.
- c. pelayanan rujukan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala UPTD;

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a) menyusun program kegiatan UPTD Labkesda berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- c) melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi umum, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD Labkesda;
- d) melaksanakan koordinasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD Labkesda;



- e) melaksanakan pemberian layanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia;
 - f) menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan sertifikat perizinan industri rumah tangga dan sertifikat laik hyginie sanitasi berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian;
 - g) melaksanakan pelayanan pemeriksaan/ pengujian sampel air dan makanan/minuman, sesuai dengan standar kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat di Daerah;
 - h) melaksanakan sosialisasi bersama dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas air dan makanan/minuman, terhadap kesehatan manusia;
 - i) melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bahan untuk keperluan pemeriksaan di UPTD Labkesda;
 - j) menyusun bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan dan laboratorium klinik.
- b. Subbagian Tata Usaha
- Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian TU mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas dimaksud meliputi:
- a) menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c) mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan;



- d) mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;
- e) mengelola dan melaporkan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
- f) melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD Labkesda guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- h) menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

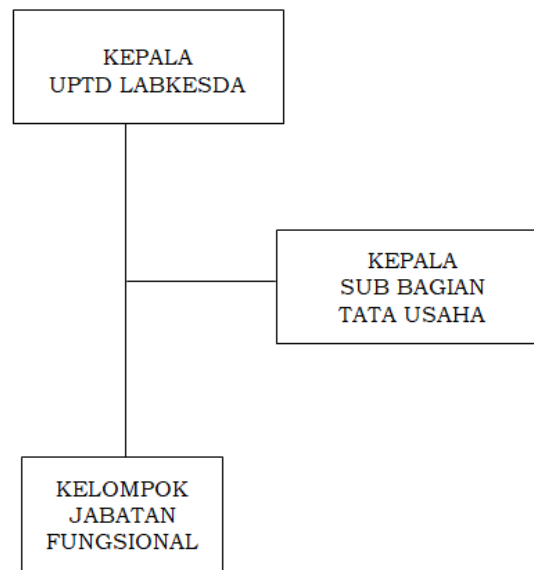
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagai berikut:



Gambar II-2 Struktur organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

2. UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu Kelas A

Kedudukan UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu. UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu melaksanakan fungsi:

- a. Pelayanan teknis operasional Pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, antara lain:
 - a) pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;
 - b) pelayanan wisata edukasi Jamu;
 - c) pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak daerah; dan
 - d) pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.
- b. Pelayanan teknis operasional Klinik Saintifikasi Jamu, antara lain:



- a) pendaftaran;
 - b) konsultasi dokter;
 - c) konsultasi apoteker;
 - d) pemeriksaan laboratorium klinik;
 - e) pelayanan resep jamu.
- c. Pelayanan teknis operasional Laboratorium Saintifikasi Jamu, antara lain:
- a) pemeriksaan simplisia;
 - b) pemeriksaan sediaan jamu;
 - c) pelayanan destilasi;
 - d) pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;
 - e) pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;
 - f) pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium; dan
 - g) pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu lainnya.

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu Kelas A, terdiri atas:

a. Kepala UPTD;

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a) menyusun program kegiatan UPTD BPSJ berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b) melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- c) melaksanakan pembinaan pelayanan administrasi umum, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD BPSJ;
- d) melaksanakan koordinasi kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di UPTD BPSJ;
- e) melaksanakan kegiatan pelayanan yang ada di UPTD BPSJ;



- f) melaksanakan perencanaan dan pengadaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bahan untuk keperluan pelayanan di UPTD BPSJ;
- g) menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan surat keterangan terkait penelitian obat tradisional/jamu berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian;
- h) melaksanakan sosialisasi bersama dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan obat tradisional/jamu.
- i) menyusun bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan di UPTD BPSJ.

b. Subbagian Tata Usaha

Dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kepala Subbagian TU mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Tugas dimaksud meliputi:

- a) menyusun bahan kebijakan teknis bidang ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) menyusun bahan koordinasi dan penyusunan program kerja dan kegiatan guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- c) mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dengan menginventarisasi kebutuhan keuangan, menyusun dan menyelesaikan serta mempertanggungjawabkan seluruh proses administrasi keuangan sehingga terselenggaranya tertib administrasi keuangan;
- d) mengelola ketatausahaan dan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, aset, dokumentasi dan kearsipan secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib ketatausahaan dan administrasi umum;



- e) mengelola dan melaporkan administrasi kepegawaian dengan mengelola data administrasi kepegawaian secara berkesinambungan serta mengelompokkan sesuai kebutuhan dan kepentingan sehingga tertib administrasi data kepegawaian;
- f) melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan program administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD BPSJ guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) menyusun bahan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- h) menyusun bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar struktur organisasi UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu sebagai berikut:



Gambar II-3 Struktur organisasi UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu

3. Unit Organisasi Bersifat Fungsional (UPT Puskesmas)

UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di wilayah kecamatan. UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas Bendan;
- b. UPT Puskesmas Kramatsari;
- c. UPT Puskesmas Tirto;
- d. UPT Puskesmas Medono;
- e. UPT Puskesmas Noyontaan;
- f. UPT Puskesmas Tondano;
- g. UPT Puskesmas Klego;
- h. UPT Puskesmas Sokorejo;
- i. UPT Puskesmas Pekalongan Selatan;
- j. UPT Puskesmas Jenggot;
- k. UPT Puskesmas Buaran;
- l. UPT Puskesmas Kusuma Bangsa;
- m. UPT Puskesmas Krapyak Kidul; dan



n. UPT Puskesmas Dukuh.

Wilayah kerja UPT Puskesmas sebagai berikut:

- a. UPT Puskemas Bendan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Podosugih dan Bendan Kergon;
- b. UPT Puskemas Kramatsari memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Pasirkratonkramat;
- c. UPT Puskemas Tirto memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Tirto dan Pringrejo;
- d. UPT Puskemas Medono memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Medono dan Sapuro Kebulen;
- e. UPT Puskemas Noyontaan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Noyontaansari;
- f. UPT Puskemas Tondano memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Poncol dan Gamer;
- g. UPT Puskemas Klego memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Klego dan Kauman;
- h. UPT Puskemas Sokorejo memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Kalibaros dan Setono;
- i. UPT Puskemas Pekalongan Selatan memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Kuripan Kertoharjo, Sokoduwet dan Kuripan Yosorejo;
- j. UPT Puskemas Jenggot memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Jenggot;
- k. UPT Puskemas Buaran memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Banyurip dan Buaran Kradenan;
- l. UPT Puskemas Kusuma Bangsa memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Panjang Wetan, Panjang Baru dan Kandang Panjang;
- m. UPT Puskemas Krapyak Kidul memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Krapyak dan Degayu; dan
- n. UPT Puskemas Dukuh memiliki wilayah kerja meliputi Kelurahan : Padukuhan Kraton dan Bandengan;

Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri atas:



a. Kepala UPT

Dipimpin oleh seorang Kepala UPT Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:

- a) menyusun perencanaan dan program kerja UPT Puskesmas;
- b) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c) melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d) menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e) melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f) melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g) memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan
- h) melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, cakupan pelayanan kesehatan;
- i) memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit; dan
- j) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas.

b. Jabatan Pelaksana

Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Puskesmas

c. Jabatan Fungsional

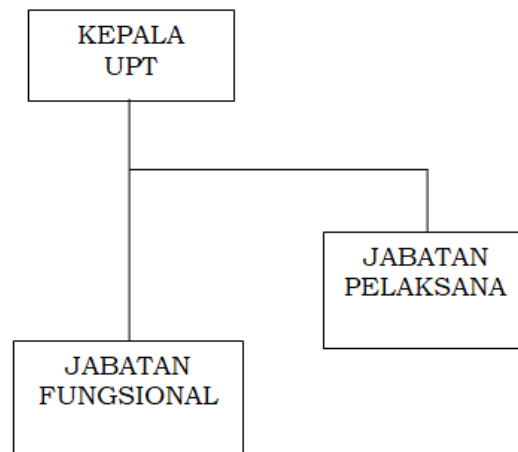
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar struktur organisasi UPT Puskesmas sebagai berikut:



Gambar II-4 Struktur organisasi UPT Puskesmas

4. Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C

RSUD Bendan merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

RSUD Bendan dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi RSUD Bendan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tiugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C, terdiri atas:



a. Direktur;

1) Tugas

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

2) Fungsi

- a) perumusan dan penetapan sasaran dan program bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b) perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- c) perumusan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
- d) penyelenggaraan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e) pengendalian manajemen rumah sakit dan manajemen mutu rumah sakit;
- f) penyelenggaraan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- g) penyelenggaraan pelayanan keperawatan, pengembangan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
- h) penyelenggaraan penunjang pelayanan medis dan non medis;
- i) penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- j) penyelenggaraan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;



- l) penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta teknologi informasi;
- m) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit;
- n) pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian Tata Usaha

1) Tugas

Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang tata usaha, perencanaan dan evaluasi, keuangan, serta umum dan kepegawaian.

2) Fungsi

- a) perumusan bahan sasaran, program kerja, dan kegiatan rumah sakit;
- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan rumah sakit;
- c) pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rumah sakit;
- d) pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran program dan kegiatan;
- e) pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan;
- f) pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- g) pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- h) pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- i) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;



- j) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evjab);
- l) pengoordinasian laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit;
- m) pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- n) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Usaha membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kerja dibidang perencanaan dan evaluasi;
 - b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program dan kegiatan;
 - d) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
 - e) menyusun bahan profil perangkat daerah;
 - f) mengelola data dan informasi;
 - g) melaksanakan koordinasi penyusunan laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit;
 - h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:



- a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi keuangan;
 - b) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi anggaran;
 - c) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian kinerja keuangan;
 - d) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
 - e) melaksanakan fungsi akuntansi;
 - f) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan;
 - g) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- a) menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, pengamanan, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - c) melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
 - d) mengelola dan membina kepegawaian;
 - e) mengelola pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di rumah sakit;
 - f) mengelola serta menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang tugasnya;



- g) mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

c. Bidang Pelayanan Medis

1) Tugas

Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis serta pelaporan di bidang pelayanan medis dan pengembangan pelayanan medis.

2) Fungsi

- a) perumusan program kerja kegiatan pelayanan medis;
- b) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis medis;
- c) pengoordinasian penyusunan tata kelola manajemen pelayanan medis dan rekam medis;
- d) pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, rekam medis dan pengembangan pelayanan medis;
- e) pengoordinasian pengelolaan data bidang pelayanan medis;
- f) pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang pelayanan medis;
- g) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h) pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- i) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Medis membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medis dan rekam medis;



- b) menyusun bahan kebijakan bidang pelayanan medis dan rekam medis;
 - c) menyusun kebutuhan pelayanan medis dan rekam medis;
 - d) mengelola dan menganalisis data medis pasien serta data pelayanan medis;
 - e) menyusun bahan tata kelola manajemen pelayanan medis dan rekam medis;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan rekam medis;
 - g) melaksanakan administrasi pelayanan medis dan rekam medis;
 - h) melaksanakan manajemen mutu pelayanan medis;
 - i) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - j) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- b. Seksi Pengembangan Pelayanan Medis, mempunyai tugas:
- a) menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan pelayanan medis;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan pelayanan medis;
 - c) melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan pelayanan medis;
 - d) melaksanakan pelayanan teknis di bidang pengembangan pelayanan medis;
 - e) melaksanakan pelayanan administrasi di bidang pengembangan pelayanan medis;
 - f) melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - g) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - h) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- d. Bidang Pelayanan Keperawatan



1) Tugas

Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis dibidang keperawatan.

2) Fungsi

- a) perumusan program kerja bidang pelayanan keperawatan;
- b) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang keperawatan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan;
- d) pengoordinasian pelaksanaan manajemen mutu bidang pelayanan keperawatan;
- e) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- h) Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan; dan
- i) Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan.

Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi;

- a. Seksi Asuhan Pelayanan Keperawatan, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan bidang asuhan pelayanan keperawatan;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang asuhan pelayanan keperawatan;
 - c) melaksanakan inventarisasi kebutuhan asuhan pelayanan keperawatan;
 - d) melaksanakan pemantauan dan pengawasan asuhan pelayanan keperawatan;
 - e) melaksanakan pemenuhan kebutuhan asuhan pelayanan keperawatan;



- f) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang asuhan pelayanan keperawatan;
 - g) melaksanakan manajemen mutu pelayanan keperawatan;
 - h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Seksi Pengembangan dan Etika Keperawatan, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan dan etika keperawatan;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang pengembangan dan etika keperawatan;
 - c) melaksanakan bimbingan etika keperawatan;
 - d) melaksanakan pengembangan pelayanan keperawatan dan etika keperawatan;
 - e) melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan etika keperawatan;
 - f) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - g) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- e. Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan
 - 1) Tugas

Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penunjang pelayanan medis dan penunjang pelayanan non medis serta pengembangan pelayanan penunjang.
 - 2) Fungsi
 - a) perumusan program kerja bidang penunjang pelayanan medis serta penunjang pelayanan non medis dan pengembangan pelayanan penunjang;



- b) pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penunjang pelayanan;
- c) pengoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penunjang pelayanan;
- d) pengoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan medis dan non medis;
- e) pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pelayanan penunjang;
- f) pengoordinasian pengelolaan data dan mutu pelayanan di bidang penunjang pelayanan;
- g) pengendalian program dan kegiatan instalasi penunjang pelayanan;
- h) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan membawahi:

- a. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis dan Pengembangan Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pelayanan non medis dan pengembangan pelayanan penunjang;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang penunjang pelayanan non medis dan pengembangan pelayanan penunjang;
 - c) melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pelayanan non medis rumah sakit;
 - d) melaksanakan koordinasi dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan non medis rumah sakit;
 - e) menyusun rencana kerja program pengembangan pelayanan penunjang non medis;



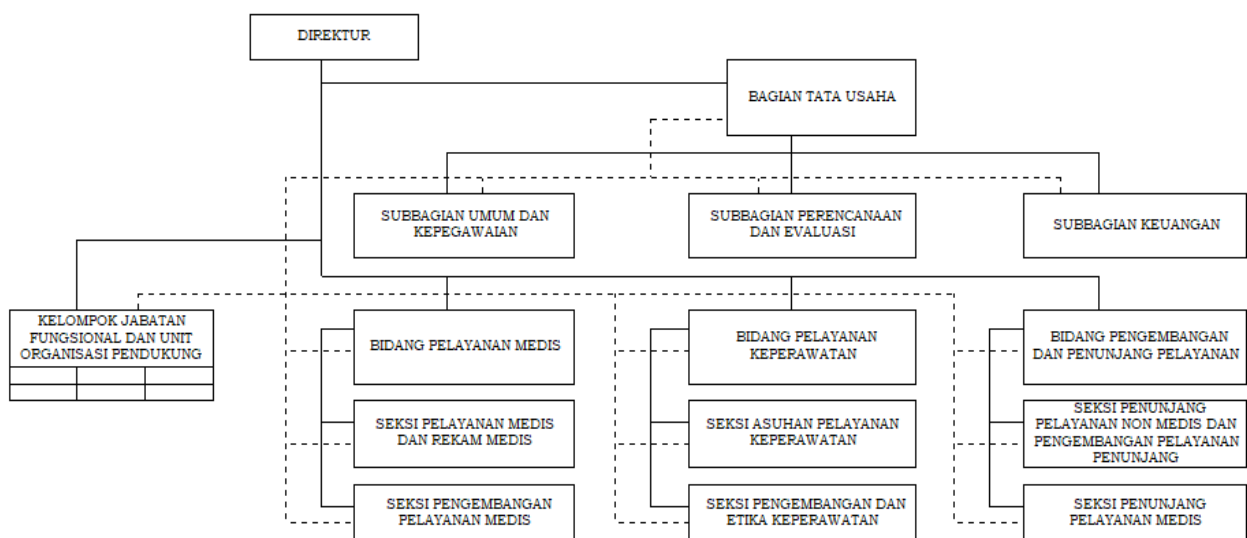
- f) melaksanakan koordinasi instalasi penunjang pelayanan non medis meliputi Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi, Central Sterile Supply Departemen (CSSD) /atau Laundry, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) medis dan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) non medis;
 - g) melaksanakan pengelolaan data dan mutu pelayanan penunjang non medis;
 - h) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - i) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- b. Seksi Penunjang Pelayanan medis, mempunyai tugas:
- a) menyusun rencana kegiatan bidang penunjang pelayanan medis;
 - b) menyusun bahan kebijakan bidang penunjang pelayanan medis;
 - c) melaksanakan inventarisasi kebutuhan logistik dan diagnostik pelayanan penunjang rumah sakit;
 - d) melaksanakan koordinasi dalam penyediaan logistik dan diagnostik penunjang pelayanan medis;
 - e) melaksanakan koordinasi instalasi penunjang pelayanan medis meliputi Laboratorium, Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), Radiologi dan Rehab Medis;
 - f) melaksanakan pengelolaan data dan mutu pelayanan penunjang medis;
 - g) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
 - h) mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian dan/atau Kepala Bidang dan/atau Kepala Subbagian dan/atau Kepala Seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar struktur organisasi RSUD Benda sebagai berikut:



Gambar II-5 Gambar struktur organisasi RSUD Benda

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai berikut:



a. Sumber Daya Manusia Kesehatan

1) Pegawai berdasarkan Golongan Kepegawaian dan Tingkat Pendidikan.

Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan sampai dengan Februari 2025 sebanyak 1.384 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan kepegawaian dapat dilihat pada Tabel II-1 sebagai berikut:

Tabel II-1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO.	UNIT KERJA	GOLONGAN KEPEGAWAIAN							NON ASN	JUMLAH
		PNS				PPPK				
		IV	III	II	I	VII	IX	X		
1	Dinas Kesehatan	16	39	8	1	0	1	0	25	90
2	UPTD Labkesda	1	9	0	0	0	0	0	7	17
3	UPTD BPSJ	3	1	0	0	0	0	0	9	13
4	UPT Puskesmas Bendan	2	24	10	0	3	0	3	23	65
5	UPT Puskesmas Buaran	1	19	0	0	0	1	0	12	33
6	UPT Puskesmas Dukuh	1	15	4	0	2	1	1	16	40
7	UPT Puskesmas Jenggot	1	16	1	0	2	0	1	19	40
8	UPT Puskesmas Klego	1	14	2	0	3	2	1	12	35
9	UPT Puskesmas Kramatsari	1	20	2	0	3	1	0	7	34
10	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	1	25	3	0	3	1	1	16	50
11	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	2	20	6	0	2	1	1	24	56
12	UPT Puskesmas Medono	4	16	2	0	1	0	0	9	32
13	UPT Puskesmas Noyontaan	1	19	2	0	2	0	2	12	38
14	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	3	21	8	0	4	0	0	23	59
15	UPT Puskesmas Sokorejo	2	20	12	0	4	0	0	18	56
16	UPT Puskesmas Tirto	1	20	1	0	1	0	0	16	39
17	UPT Puskesmas Tondano	1	18	1	0	1	0	0	12	33
18	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	29	105	72	0	8	0	3	437	654
TOTAL										1.384

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



Sebagian besar 30,42% Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan berdasarkan golongan terbanyak adalah golongan III yaitu 421 orang, sedangkan golongan II sebanyak 9,68% (134 orang), golongan IV sebanyak 5,13% (71 orang) dan golongan I sebanyak 0,07% (1 orang). Sedangkan komposisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Golongan VII sebanyak 2,82% (39 orang), golongan X sebanyak 0,94% (13 orang) dan golongan IX sebanyak 0,58% (8 orang).

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table II-2 berikut:

Tabel II-2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2	S1 / D-IV	D-III	D-I	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Kesehatan	1	8	44	16	2	13	3	3	90
2	UPTD Labkesda	0	0	7	6	0	4	0	0	17
3	UPTD BPSJ	0	0	4	4	0	5	0	0	13
4	UPT Puskesmas Bendan	0	0	22	33	0	10	0	0	65
5	UPT Puskesmas Buaran	0	0	15	14	0	3	1	0	33
6	UPT Puskesmas Dukuh	0	0	19	17	0	3	0	1	40
7	UPT Puskesmas Jenggot	0	0	15	20	0	5	0	0	40
8	UPT Puskesmas Klego	0	0	15	13	0	6	1	0	35
9	UPT Puskesmas Kramatsari	0	0	15	15	0	3	0	1	34
10	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	0	0	18	22	0	9	1	0	50
11	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	0	1	20	26	0	7	1	1	56
12	UPT Puskesmas Medono	0	2	14	10	0	5	0	1	32
13	UPT Puskesmas Noyontaan	0	0	16	19	0	1	2	0	38
14	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	0	0	22	31	0	6	0	0	59
15	UPT Puskesmas Sokorejo	0	0	17	31	0	6	2	0	56
16	UPT Puskesmas Tirto	0	0	20	15	0	4	0	0	39
17	UPT Puskesmas Tondano	0	0	17	13	0	3	0	0	33
18	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	0	46	210	308	0	90	0	0	654
TOTAL										1.384

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



Sebagian besar 44,29% pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan berlatar belakang pendidikan D-III (613 orang), sedangkan S-1 sebesar 36,85% (510 orang), SMA Sederajat 13,22% (183 orang), S-2 sebanyak 4,12% (57 orang), SMP Sederajat sebanyak 0,79% (11 orang), SD Sederajat sebanyak 0,51% (7 orang), D-I sebanyak 0,14% (2 orang) sedangkan paling sedikit 0,07% S-3 sebanyak (1 orang).

2) Pegawai berdasarkan Jabatan (Struktural, Fungsional dan pelaksana)

Pegawai memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara jelas berada dalam struktur organisasi sedangkan Jabatan Fungsional merupakan jabatan karier PNS yang bertugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pemenuhan jabatan tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel II-3 berikut:



Tabel II-3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Dinas Kesehatan
UPTD dan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2025.

NO.	JABATAN	Dinas Kesehatan	UPTD Labkesda	UPTD BPSJ	UPT Puskesmas Bendan	UPT Puskesmas Buaran	UPT Puskesmas Dukuh	UPT Puskesmas Jenggot	UPT Puskesmas Klego	UPT Puskesmas Kra mat sari	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	UPT Puskesmas Medono	UPT Puskesmas Noyontaan	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	UPT Puskesmas Sokorejo	UPT Puskesmas Tirta	UPT Puskesmas Tondano	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	JUMLAH
A	STRUKTURAL	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	24
B	FUNGSIONAL KESEHATAN	41	7	2	42	20	24	21	22	27	34	30	22	26	36	36	23	21	443	877
1	Dokter spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
2	Dokter	1	0	1	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	15	67
3	Dokter gigi	1	0	0	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	2	16
4	Perawat	9	0	0	14	6	7	6	7	8	6	10	6	8	11	12	7	6	210	333
5	Perawat gigi	1	0	0	2	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	4	25
6	Bidan	4	0	0	11	3	3	3	3	4	11	7	5	2	11	10	4	3	48	132
7	Penyuluh kesehatan	3	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	0	19
8	Sanitarian	2	2	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	17
9	Epidemiologi	4	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9
10	Adminkes	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
11	Pranata laboratorium	0	5	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	30	49
12	Apoteker	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	28
13	Tenaga Teknis Kefarmasian/Asisten Apoteker	5	0	1	2	1	1	0	0	1	2	1	1	1	1	2	1	1	37	58
14	Fisioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
15	Psikologi Klinis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2



NO.	JABATAN	Dinas Kesehatan	UPTD Labkesda	UPTD BPSJ	UPT Puskesmas Bendan	UPT Puskesmas Buaran	UPT Puskesmas Dukuh	UPT Puskesmas Jenggot	UPT Puskesmas Klego	UPT Puskesmas Kra mat sari	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	UPT Puskesmas Medono	UPT Puskesmas Noyontaan	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	UPT Puskesmas Sokorejo	UPT Puskesmas Tirta	UPT Puskesmas Tondano	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	JUMLAH
16	Okupasi terapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Terapis wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
18	Nutrisi	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	7	16
19	Elektromedik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
20	Radiografer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
21	Fisikawan medik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Perekam medis	1	0	0	2	1	2	2	2	2	1	2	1	3	1	1	2	1	9	33
23	Penata anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
24	Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C	FUNGSIONAL NON KESEHATAN	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
1	Pranata Komputer	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
2	Analisis Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Arsiparis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
D	JABATAN PELAKSANA	13	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	2	0	0	0	21
E	TENAGA NON ASN	25	7	9	23	12	16	19	12	7	16	24	9	12	23	18	16	12	437	697
1	BLUD	0	0	1	23	11	12	14	12	7	13	24	8	10	23	17	12	12	423	622
2	Non BLUD	25	7	8	0	1	4	5	0	0	3	0	1	2	0	1	4	0	14	75
TOTAL		90	17	13	65	33	40	40	35	34	50	56	32	38	59	56	39	33	895	1625

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025



b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Tabel II-4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	Kecamatan Pekalongan				Total
	Barat	Timur	Utara	Selatan	
RSUD	1	-	-	-	1
Puskesmas	4	4	3	3	14
Puskesmas Pembantu	7	5	6	5	23
Instalasi Farmasi Kota	-	1	-	-	1
Klinik Pratama	2	-	4	-	6
Klinik Utama	-	-	-	-	-
Apotik (BUMN)	2	-	-	-	2
Labkesda	1	-	-	-	1

Tabel II-5

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Swasta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	Kecamatan Pekalongan				Total
	Barat	Timur	Utara	Selatan	
Rumah Sakit Umum	3	2	1	1	7
Klinik Utama	3	1	2	0	6
Klinik Pratama	9	8	7	1	25
Apotek	19	25	15	13	72
PBF	-	-	-	-	-
Industri Alkes	1	3	2	1	7
Praktek Dokter Umum	16	16	13	8	53
Praktek Dokter Spesialis	-	2	2	-	4
Praktek Dokter Gigi	8	4	2	1	15



Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	Kecamatan Pekalongan				Total
	Barat	Timur	Utara	Selatan	
Praktek Bidan	7	5	1	4	17
Praktek Perawat	1	1	1	-	3

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di Kota Pekalongan sudah cukup lengkap akan tetapi persebarannya belum merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Oleh karena itu akan dilakukan pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan agar merata di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

a. Sarana UKBM

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan bentuk partisipasi/ peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Bentuk peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu manusianya, pendanaannya, aktivitasnya, dan kelembagaannya seperti Posyandu, Pos UKK, Poskestren, Posbindu, dan lain –lain.

Tabel II-6

Jenis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

No	Jenis UKBM	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Posyandu	414	413	414	416	418
2.	Posbindu	42	42	42	42	42
3.	Posyandu lansia	77	93	93	95	95
4.	Pos UKK	14	13	12	14	17
5.	Poskestren	4	9	9	9	9
6.	SBH	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020-2024

UKBM di Kota Pekalongan sudah cukup lengkap, akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pembiayaan UKBM belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor terkait dan organisasi kemasyarakatan.



b. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Ketersediaan Obat dan Vaksin dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2025-2029 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan yaitu meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2025 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 100%.

Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan ketersediaan obat esensial dan generik di sarana pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan Puskesmas.

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan. Jumlah item obat yang dipantau adalah 40 item obat untuk pelayanan kesehatan dasar. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Kota Pekalongan pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 100%.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan di bidang kesehatan, capaian kinerja Dinas Kesehatan berdasarkan sasaran/target renstra tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai pada tabel berikut :



Tabel II-7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)					0,18	0,25	0,30	0,35		0,18	0,28	0,35	0,38		100	112	116,67	108,57
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)				102	102	128,28	116,21	104,14	152,41	188,23	123,87	122,77	129,70	149,4	184,5	103,56	94,65	80,29
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)				9,6	9,6	8,21	7,91	7,60	8,81	8,90	9,91	13,71	10,89	91,7	92,7	82,85	57,70	69,76
4.	Angka kematian Balita (AKABA)				12,3	12,25	10,23	9,92	9,61	10,84	10,27	12,21	18,42	16,86	88,1	83,8	83,78	53,87	56,99
5.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita										20,6	23,1	28,2	19,3					
6.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)										49	68	98	98,5					
7.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)										93	91,8	94,86	95					
8.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional										81,3	86,43	98,1	98,5					
9.	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota						89	90	91			31,57	18	13,52			35,47	20	14,86
10.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	(IKK Outcome)																		
11.	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar						75%	80%	85%			70,43%	72%	79,45%			93,9%	90%	93,47%
12.	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek						93,5%	94%	94,5%			88,05%	90,59%	94,17%			94,17%	96,38%	99,66%
13.	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar						100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100%	100%
14.	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran						94%	96%	98%			100%	100%	97,22%			106,38%	104,17%	99,2%
15.	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat						95%	96%	96%			100%	94,22%	95,8%			105,26%	98,14%	99,79%
16.	Persentase Rumah Tangga Sehat						91%	92%	93%			98,04%	98,65%	97,22%			107,73%	107,22%	104,54%
17.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	98,22%	95,94%	97,49%	97,5%	100%	98,22%	95,94%	97,49%	97,5%	100%
18.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	99,59%	98,77%	99,47%	99,16%	99,53%	99,59%	98,77%	99,47%	99,16%	99,53%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	bayi baru lahir (IKK)																		
20.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	88,39%	83,40%	96,37%	99,86%	100%	88,39%	83,40%	96,37%	99,86%	100%
21.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	52,54%	100%	100%	100%	100%	52,54%	100%	100%	100%	100%
22.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	28,75%	61,88%	78,19%	85,96%	90,35%	28,75%	61,88%	78,19%	85,96%	90,35%
23.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	70,57%	79,92%	87,5%	89,78%	98,64%	70,57%	79,92%	87,5%	89,78%	98,64%
24.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	27,10%	76,11%	47,29%	65,29%	81,68%	27,10%	76,11%	47,29%	65,29%	81,68%
25.	Persentase penderita Diabetes Melitus DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
26.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	78,43%	94,73%	100%	100%	100%	78,43%	94,73%	100%	100%	100%
28.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (IKK)		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100	95,67%	100%	100%	100%	100	95,67%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020 -2024



Tabel II-8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BTL																	
Blj Pegawai																	
BL																	
- Blj Pegawai	28.501.290.000	50.554.031.000	50.171.504.000	57.036.458.000	62.294.085.000	26.168.024.558	47.712.251.483	46.699.765.697	54.065.309.216	59.765.258.767	91,81	94,38	93,08	94,79	95,94	54,64	57,09
- Blj B/J	50.401.472.000	59.284.077.000	36.011.306.000	41.148.666.000	46.672.794.000	49.925.147.679	56.862.306.224	35.333.039.503	38.568.323.655	44.072.117.148	99,05	95,91	98,12	93,73	94,43	23,15	22,07
- Blj Modal	0	377.000.000	0	0	0	0	377.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	-	-
TOTAL BL+BTL	5.907.229.000	8.378.094.000	7.283.416.000	13.655.876.000	5.525.476.000	5.841.292.210	7.556.189.488	6.930.185.079	13.588.990.580	5.494.427.890	98,88	90,19	95,15	99,51	99,44	23,38	23,52
	84.809.991.000	118.593.202.000	93.694.276.000	111.941.000.000	114.592.355.000	81.934.464.447	112.507.747.195	89.190.306.479	106.321.995.669	109.431.803.805	96,61	94,87	95,19	90,07	95,5	33,78	33,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020-2024



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Dinas termasuk UPT dan UPTD memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat pada semua kelompok umur. Berikut adalah jenis pelayanan dan program pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan beserta kelompok sasarannya.

Tabel II-9

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

No	Program	Kelompok Sasaran
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Ibu Hamil
		Ibu Bersalin
		Bayi usia 0-28 hari
		Balita berusia 0-59 bulan
		Anak sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 9
		Usia produktif (berusia 15-59 tahun)
		Usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih)
		Penderita Hipertensi
		Penderita Diabetes Melitus
		ODGJ Berat
		Orang terduga tuberkulosis
		Orang dengan risiko terinfeksi HIV
		Pelaku usaha fasilitas pelayanan Kesehatan
2	Pengendalian dan pengawasan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	Pelaku usaha pangan
		Pelaku usaha apotek dan toko obat
		Apoteker dan tenaga kefarmasian



3	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Tenaga Kesehatan
4	Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Masyarakat umum

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengoptimalkan capaian indikator pada kelompok sasaran dan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, maka target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya

- Mempersiapkan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Persalinan.
- Terlaksananya akreditasi di semua Puskesmas dengan status Paripurna.
- Puskesmas mempunyai fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*difabel*).
- Semua Kelurahan di Kota Pekalongan bisa menjadi Kelurahan Siaga Aktif
- Peningkatan jumlah Posyandu aktif.
- Adanya Sistem Surveilans yang terintegrasi, cepat, tepat, akurat, berdasarkan bukti dan holistik disemua program.
- Adanya Sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang holistik, terintegrasi dan berbasis kinerja.
- Adanya Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang lengkap, akurat serta terintegrasi.
- Penduduk Kota Pekalongan yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 99%.
- Semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) .
- Menjamin ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan formularium.
- Inventarisasi barang milik daerah secara tertib administrasi sebesar 100%



2. Status Kesehatan

Harapan kondisi derajat kesehatan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 9,55 per 1000 Kelahiran Hidup.
- b) Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 12,25 per 1000 Kelahiran Hidup.
- c) Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup.
- d) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar <14,14%.
- e) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) sebesar 90%.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Peluang dan Tantangan Eksternal

a) Peluang Eksternal

1) Kelembagaan :

Adanya perubahan regulasi di pusat dan daerah yang memungkinkan untuk mengevaluasi kelembagaan yang ada.

2) Sumber Daya :

- Kesempatan mengalokasikan dan mengajukan formasi kebutuhan tenaga kesehatan melalui seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan non PNS.
- Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Kesehatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program kesehatan.
- Adanya dukungan dari organisasi profesi kesehatan di Pekalongan.
- Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan di Pekalongan.
- Adanya kesempatan peningkatan pendidikan formal dan pelatihan teknis dan fungsional kesehatan melalui BKPSDM dan Badan Diklat.

3) Pembiayaan :



- Terdapat bantuan anggaran dari WHO dan dunia usaha/masyarakat.
- Adanya program JKN.
- Adanya pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK BLUD).

b) Tantangan Eksternal

1) Kelembagaan :

- Dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.
- Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan dunia usaha dalam penanganan masalah kesehatan sudah dilakukannamun belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakkan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya kesehatan. Kemitraan berbagai unsur terkait termasuk *stakeholder* belum ditata secara baik sesuai peran, fungsi dan tanggung jawab masing – masing dalam pemberdayaan di bidang kesehatan.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :

- Pemenuhan formasi masih tergantung pada kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3) Pembiayaan :

- Kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan belum tumbuh dengan baik, terlihat dari masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk membiayai jaminan pemeliharaan kesehatannya.
- Ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan baik dari masyarakat, swasta dan dunia usaha masih rendah, belum tertata secara terpadu dan terorganisir.
- Pengalokasian anggaran untuk upaya kesehatan masyarakat (UKM) belum seimbang dibandingkan anggaran untuk upaya kesehatan perorangan (UKP).



4) Budaya :

- Gaya Hidup yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, antara lain : sakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, stroke, diabetes, dan lainnya yang kesemuanya disebabkan oleh 3 faktor resiko utama, yaitu : merokok, kurang aktifitas fisik dan kurangnya makan makanan berserat. Untuk mencegah hal tersebut perlu diterapkan gaya hidup sehat setiap hari.
- Masalah sosial budaya masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat akan memberikan peran penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Adanya perubahan sosial budaya di suatu daerah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Hubungan antara budaya dan kesehatan sangatlah erat, kebudayaan/kultur ataupun kepercayaan dapat membentuk kebiasaan dan respons masyarakat terhadap kesehatan. Salah satu contoh masih adanya mitos/ kebiasaan yang dikaitkan dengan kehamilan, kelahiran, pemberian makanan bayi dan cara-cara pengobatan tertentu sesuai dengan tradisinya, budaya paternalistik dimana pengambil keputusan ada pada suami, orang tua ataupun mertua.
- Kota Pekalongan berada di daerah pantai namun masyarakat kurang gemar makan ikan.

2. Kelemahan dan Kekuatan Internal

a) Kelemahan Internal

1) Kelembagaan (Dinkes dan Mitra):

- Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang ada saat ini tipe B padahal beban dan tanggung jawab yang diemban sama dengan tipe A.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana) :



- Tenaga kesehatan strategis (dokter, dokter spesialis dasar dan anestesi, dokter gigi, perawat, bidan, sanitarian) masih kurang baik kualitas maupun kuantitas termasuk distribusi penempatan. Hal ini dapat menyebabkan penempatan tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Pengadaan alat kesehatan di beberapa sarana pelayanan kesehatan sudah mengikuti kemajuan teknologi, namun belum diikuti dengan alokasi anggaran untuk pemeliharaan yang memadai, sehingga usia pakai alat kesehatan tidak berumur panjang.
- Sebagian besar Puskesmas PONED belum berfungsi secara optimal karena belum didukung kesiapan serta ketersediaan tenaga terlatih.

3) Pembiayaan:

- Proporsi anggaran lebih besar untuk kegiatan kuratif dari pada promotif dan preventif.

b) Kekuatan Internal

1) Kelembagaan

- Keberadaan UPT Dinas Kesehatan (RSUD, Puskesmas, Labkesda dan BPSJ) memberi kontribusi dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2) Sumber Daya (Manusia dan Sarana prasarana)

- Adanya kesempatan peningkatan pendidikan secara formal dan informal tenaga kesehatan melalui dana APBD maupun APBN.
- Pengusulan ketersediaan/ pemenuhan sarana dan prasarana melalui anggaran APBD Provinsi, DAK dan TP.

3) Pembiayaan

- Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan baik dari Pemerintah Provinsi/ APBD (hibah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau), Pemerintah pusat (DAK, dan DAU Earmark) dan anggaran bantuan luar negeri (GF-ATM, dan NLR).



2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

Permasalahan dan Isu Strategis merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kinerja perangkat daerah.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Mendasarkan pada hasil identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, maka didapatkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta pelayanan kesehatan siklus hidup lainnya.
 - a. Risiko tinggi kehamilan dan melahirkan akibat kondisi ibu hamil yang tidak sehat menyebabkan komplikasi kebidanan.
 - b. Masih ditemukan kasus anemia pada ibu hamil dan wanita usia subur serta beberapa diantaranya kekurangan energi kalori.
 - c. Keterlambatan/ketidakmampuan dalam mengakses pemanfaatan pelayanan prenatal dan obstetri.
 - d. Belum semua ibu hamil memeriksakan kehamilan secara lengkap dan mendapat pelayanan antenatal sesuai standar.
 - e. Masih ada ibu bersalin yang melakukan persalinan tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan tenaga kesehatan yang kompeten.
 - f. Belum semua ibu nifas mendapat pelayanan kesehatan pasca persalinan sesuai standar.
 - g. Masih ditemukannya kasus komplikasi neonatal dan bayi resiko tinggi dengan berat badan lahir rendah.
 - h. Belum semua bayi baru lahir mendapat pelayanan neonatal sesuai standar.
 - i. Masih ada bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
 - j. Masih banyak anak baduta yang belum mendapatkan imunisasi lanjutan.
 - k. Rendahnya kesadaran orang tua memeriksakan tumbuh kembang balita di posyandu minimal 8 kali/tahun.
- 2) Belum optimalnya penanganan stunting dan peningkatan gizi Masyarakat
 - a. Rendahnya asupan balita terhadap makanan bergizi, vitamin dan mineral serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.



- b. Kurang baiknya pola asuh bayi dan balita.
 - c. Akses sanitasi dan air bersih keluarga yang rendah.
 - d. Beberapa temuan kasus balita gizi buruk disertai dengan penyakit infeksi kronis.
- 3) Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit
- a. Masih ditemukannya kasus TB baru dan kasus TB MDR (Multi Drug Resistance) akibat tidak tuntas/ tidak teratur dalam meminum obat TB.
 - b. Kasus ISPA dan diare masih menjadi penyakit terbanyak yang terjadi pada anak balita.
 - c. Kasus kusta baru masih saja ditemukan setiap tahunnya.
 - d. Upaya penemuan dan pengobatan HIV/ AIDS belum optimal.
 - e. Eliminasi kasus DBD belum berjalan baik sebab masyarakat masih enggan melakukan PSN.
 - f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko hipertensi, diabetes melitus, kanker dan kesehatan jiwa.
 - g. Masyarakat usia produktif dan lansia masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan Kesehatan maupun di posbindu dan posyandu lansia.
- 4) Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
- a. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas data kemiskinan dan data penerima jaminan kesehatan lintas sektor.
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat berpenghasilan menengah keatas dan pekerja sektor informal untuk mengikuti program jaminan kesehatan secara mandiri.
 - c. Masih ada jenis dan jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar.
 - d. Masih ada rumah sakit yang belum terakreditasi paripurna.
 - e. Kurangnya tenaga yang memahami tata kelola pelayanan Kesehatan FKTP dan FKTL.
- 5) Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
- a. Masih kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM di Dinas Kesehatan sehingga beban kerja pegawai terlalu besar.



- b. Belum terpenuhi jenis tenaga kesehatan sesuai standar puskesmas.
 - c. Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/ kualitas tenaga kesehatan.
 - d. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan strategis masih kurang.
 - e. Perencanaan, pemenuhan dan distribusi SDM Kesehatan khususnya tenaga kesehatan belum terkoodinasi dengan baik.
- 6) Belum optimalnya sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan minuman sesuai standar
- a. Masih ada sarana perbekalan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, Toko Obat) belum sesuai standar
 - b. Masih ada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) belum memenuhi komitmen dalam pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
 - c. Masih ada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) belum memenuhi standar
 - d. Terbatasnya SDM Kesehatan dalam pengawasan sarana perbekalan Kesehatan dan pengelolaan makanan minuman
- 7) Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
- a. Belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga.
 - b. Kegiatan penyuluhan PHBS dan keluarga sehat belum lakukan secara optimal.
- 8) Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja dan layanan administrasi penunjang urusan Kesehatan.
- a. Perlunya peningkatan pelayanan publik satu pintu.
 - b. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana.
 - c. Belum optimalnya informasi publik sesuai ketentuan peraturan.
 - d. Perlunya peningkatan inovasi pelayanan kesehatan bagi Masyarakat.



Tabel II-10

Keterkaitan Masalah Pokok dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas kesehatan Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta pelayanan kesehatan siklus hidup lainnya	• Belum optimalnya program dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita untuk menurunkan AKI, AKB dan AKABA • Belum optimalnya program dan peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut
2.		Belum optimalnya penanganan stunting dan peningkatan gizi Masyarakat	• Belum optimalnya penurunan dan penanganan balita stunting dan peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat • Belum optimalnya upaya kesehatan olahraga dan kesehatan lingkungan
3.		Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit	• Belum optimalnya deteksi dini faktor risiko dan pengobatan Penyakit Tidak Menular (PTM) • Belum optimalnya penemuan kasus dan pengobatan Penyakit Menular (PM) • Belum optimalnya cakupan imunisasi rutin lengkap



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.		Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan	• Belum optimalnya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan primer dan rujukan • Belum optimalnya implementasi akreditasi dan pendampingan manajemen mutu fasilitas pelayanan Kesehatan • Belum optimalnya jaminan pembiayaan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan pemenuhan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>
5.		Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	• Belum optimalnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga Kesehatan • Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDMK
6.		Belum optimalnya sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan minuman sesuai standar	Belum optimalnya pemenuhan standar sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan minuman
7.		Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat	• Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat • Belum optimalnya Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Posyandu sebagai ujung tombak layanan masyarakat
8.	Belum optimalnya kinerja pelayanan publik	Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja dan layanan administrasi	• Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penunjang Kesehatan urusan	(SAKIP) • Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintahan • Belum optimalnya implementasi Prosedur Standar Operasional (SOP) pelayanan publik dalam mendukung capaian kinerja bidang kesehatan

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tahun 2025-2029. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas suatu daerah dan masyarakat di masa datang guna memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, maka isu-isu strategis dari hasil identifikasi permasalahan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus stunting dan gizi buruk pada balita.

Adanya kasus kematian ibu dan bayi ini disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan resiko tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilan yang sesuai standar, serta koordinasi antara pusat layanan dasar (puskesmas, praktek swasta, klinik dll) dengan layanan rujukan (RS) masih belum maksimal. Kasus stunting dan kekurangan gizi pada anak balita antara lain disebabkan karena belum tepatnya pola asuh, pemberian gizi seimbang dan faktor ekonomi.

2. Masih adanya penyakit menular dan tidak menular.

Adanya kasus penyakit menular ini salah satu penyebab antara lain faktor pengetahuan tentang bahayanya penyakit dari masyarakat yang masih



kurang. Adanya faktor sosial ekonomi juga berkaitan erat dengan kepadatan rumah, sehingga sulit mendapatkan udara dan ventilasi yang baik serta pencahayaan yang kurang, sanitasi kerja yang dapat memudahkan penularan virus dengan cepat. Dan untuk penyakit tidak menular disebabkan karena masyarakat masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di fasilitas pelayanan kesehatan

3. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Mendorong peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam upaya mendukung Universal Health Coverage yang memastikan setiap warga memiliki akses ke pelayanan kesehatan berkualitas baik dan biaya terjangkau. Selain itu usaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan termasuk dalam hal ini peningkatan sarana prasarana, ketersediaan alat kesehatan, obat-obatan, vaksin dan perbekalan kesehatan.

4. Masih kurangnya pemenuhan kuantitas, pemerataan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di fasilitas kesehatan yang sesuai standar.

Pemerataan SDM Kesehatan yang kompeten yang memenuhi standar juga turut meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.

5. Masih kurangnya sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan dan minuman sesuai standar.

Sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan dan minuman sesuai standar akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan perbekalan kesehatan, keamanan pangan dan tempat pengelolaan pangan.

6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan pentingnya PHBS akan memiliki dampak pada penurunan kasus kematian, kasus stunting, kasus kesakitan penyakit menular dan tidak menular.

7. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berintegritas.

Perlunya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.



Tabel II-11
Isu Strategis Dinas Kesehatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. UKBM ada di setiap Desa 2. Posyandu ada di setiap Dusun/ RW 3. Ketersediaan Dana Desa untuk kesehatan sudah dimanfaatkan di semua desa dan kelurahan 4. Keberadaan tenaga kesehatan di semua desa dan kelurahan 5. Puskesmas, Pustu hingga Posbindu melakukan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Semua 6. Puskesmas dan Rumah Sakit Sudah	1. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita serta pelayanan kesehatan siklus hidup lainnya 2. Belum optimalnya penanganan stunting dan peningkatan gizi Masyarakat 3. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit 4. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan Kesehatan 5. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 6. Belum optimalnya sarana perbekalan	1. Kualitas hidup sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan 2. Belum meratanya distribusi kesejahteraan Masyarakat 3. Ancaman keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air 4. Peningkatan ancaman risiko bencana dan kerentanan perubahan iklim 5. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas keuangan daerah	1. Kualitas hidup sumber daya 2. Ledakan populasi 3. Pemanasan global 4. Pengaruh gaya hidup 5. Polusi lingkungan 6. Sanitasi dan air bersih 7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tangguh 8. Kelembagaan yang tangguh	1. Bonus Demografi 2. Perubahan iklim 3. Bencana alam 4. Pencemaran lingkungan 5. Hilirisasi tambang 6. Krisis air bersih 7. Sanitasi buruk 8. Biaya pengobatan/ Kesehatan 9. Pendidikan berkualitas 10. Tingkat kemiskinan 11. Inovasi dan digitalisasi	1. Masih tingginya masalah kesehatan seperti AKI, AKB, Stunting 2. Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular 3. Angka kesakitan dan kematian akibat KLB, Bencana, Krisis Kesehatan 4. Permasalahan sampah dan limbah 5. Sanitasi layak dan akses air bersih 6. Beban biaya kepesertaan Masyarakat miskin 7. Penimngkatan tata Kelola	1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus stunting dan gizi buruk pada balita 2. Masih adanya penyakit menular dan tidak menular 3. Belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan 4. Masih kurangnya pemenuhan kuantitas, pemerataan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di fasilitas kesehatan yang sesuai standar 5. Masih kurangnya sarana perbekalan kesehatan dan



Terakreditasi	kesehatan dan pengelolaan makanan minuman sesuai standar 7. Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat 8. Penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja (SAKIP) 9. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan 10. Penguatan implementasi Prosedur Standar Operasional (SOP) pelayanan publik dalam mendukung capaian kinerja bidang kesehatan				8. Pemerintahan yang baik dan bersih	pengelolaan makanan dan minuman sesuai standar 6. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 7. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan berintegritas
---------------	---	--	--	--	---	--



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi di daerah. Sedangkan sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Pernyataan tujuan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Pada Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kota Pekalongan memiliki tujuan yaitu **Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik**, dengan indikator sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat**, dengan indikator kinerja sasaran:
 - b. Persentase SPM kesehatan
 - c. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
 - d. Prevalensi Stunting (IUP)
- 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, dengan Nilai SAKIP OPD sebagai indikatornya.



Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Mewujudkan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik											
			Usia Harapan Hidup	tahun	74,79	74,86	75,08	75,3	75,51	75,73	75,95	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	82,79	82,89	82,99	83,09	83,19	83,29	83,39	
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat										
			Persentase SPM Kesehatan	persen	97,80	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	NA	54,05	54,05	54,05	64,86	64,86	75,68	
			Prevalensi Stunting (IUP)	persen	19,3	18,44	17,58	16,72	15,86	15,00	14,14	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah										
			Nilai SAKIP OPD	nilai	83,20	83,22	83,24	83,26	83,28	83,30	83,32	



3.3 Strategi Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029

Untuk menjawab sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan. Strategi Dinas Kesehatan yang disusun akan diarahkan untuk mewujudkan visi **“Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah”** dan misi 3 “Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat. Penentuan strategi yang tepat dapat mendukung tercapainya program, kegiatan dan sub kegiatan yang bermanfaat bagi kemajuan bidang kesehatan. Strategi yang akan ditempuh kami sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III-2
Strategi Renstra Dinas Kesehatan

	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema Pembangunan RPJMD	Transformasi sosial yang produktif, berkarakter dan berbudaya melalui penguatan kualitas dan manajemen SDM sebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan	Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah disertai dengan sistem peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat	Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup serta tata kelola investasi	Penguatan Pembangunan Infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan yang berkualitas	Optimalisasi pembangunan pondasi Mina Batik”
Strategi Tahunan RPJMD	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan/pem binaan/pengem	Penguatan tata kelola kesehatan, peningkatan kolaborasi stakeholder dalam	Perwujudan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman, tahan iklim, dan ramah lingkungan	Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan inovasi layanan kesehatan yang efisien, terjangkau dan inklusif serta



	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	bangan SDM kesehatan yang berkompeten, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat kesehatan	penerapan dan pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat	dalam rangka mendukung penguatan sistem ketahanan kesehatan masyarakat	yang sesuai standar serta peningkatan cakupan kualitas hunian layak yang memenuhi syarat Kesehatan	perwujudan Kota Sehat
Strategi Renstra Dinas Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan primer dan rujukan	Kolaborasi stakeholder dalam penerapan dan pembudayaan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Peningkatan mutu layanan, tata kelola dan keselamatan pasien serta peningkatan layanan kesehatan yang berbasis green hospital dalam operasional RS	Pemenuhan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan serta ketersediaan layanan primer dan rujukan yang bermutu dan pengobatan yang komprehensif	Penyediaan layanan inovatif berbasis teknologi dalam sistem layanan kesehatan



3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kesehatan di Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan arah kebijakan strategis sebagaimana kami sajikan dalam table berikut:

Tabel III-3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

NO	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua	1. Penguatan program dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak dan balita untuk menurunkan AKI, AKB dan AKABA 2. Penguatan program dan peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut 3. Percepatan penurunan dan penanganan balita stunting dan peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat 4. Peningkatan upaya kesehatan olahraga dan kesehatan lingkungan 5. Peningkatan deteksi dini faktor risiko dan pengobatan Penyakit Tidak Menular (PTM) 6. Peningkatan penemuan kasus dan pengobatan Penyakit Menular (PM) 7. Peningkatan cakupan imunisasi rutin lengkap 8. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan primer dan rujukan 9. Peningkatan implementasi akreditasi dan pendampingan manajemen mutu fasilitas pelayanan Kesehatan 10. Penyediaan jaminan pembiayaan Kesehatan	



		melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) 11. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan dan pemetaan tenaga kesehatan 12. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM 13. Peningkatan pemenuhan standar sarana perbekalan kesehatan dan pengelolaan makanan minuman 14. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat 15. Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) dan Posyandu sebagai ujung tombak layanan Masyarakat 16. Penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja (SAKIP) 17. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan 18. Penguatan implementasi Prosedur Standar Operasional (SOP) pelayanan publik dalam mendukung capaian kinerja bidang kesehatan	
--	--	---	--



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2025-2029, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selama tahun 2025-2030, dapat dilihat pada Tabel IV-1.

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menetapkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari empat kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari tujuh sub kegiatan, yaitu :



- 1) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 4) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 5) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - 6) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
 - 7) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari dua puluh tiga sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 15) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 16) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 18) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 19) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya



- 20) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 21) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 23) Operasional Pelayanan Puskesmas (14 UPT Puskesmas)
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi , terdiri dari satu subkegiatan, yaitu:
 - 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
2. Program Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan, terdiri dari dua kegiatan :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, terdiri dari tiga kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga



- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, terdiri dari dua kegiatan:
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari tujuh kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari satu sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari tujuh sub kegiatan, yaitu :



- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari tiga sub kegiatan, yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Peningkatan Pelayanan BLUD, terdiri dari 15 sub kegiatan, yaitu :
- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (14 UPT Puskesmas dan 1 UPTD BPSJ)

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Kesehatan Kota Pekalongan selama tahun 2025-2030, dapat dilihat pada Tabel IV-1.



Tabel IV-1
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan capaian Usia Harapan Hidup (UHH) sesuai dengan yang ditargetkan	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08		75,3		75,51		75,73		75,95	
1.1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas, Merata dan Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat dengan capaian SPM kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan prevalensi stunting yang semakin rendah sesuai dengan yang ditargetkan	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	97,80	100	100		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	NA	54,05	54,05		54,05		64,86		64,86		75,68	
		Prevalensi Stunting (IUP)	Persen	19,3	18,44	17,58		16,72		15,86		15		14,14	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Fasilitas, Penyediaan Layanan, Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Paripurna	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	Persen	79,45	79,5	79.6	52.754.309.000	79.7	57.823.271.000	79.8	62.861.428.000	79.9	67.747.776.000	80	70.248.294.000
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang paripurna	Persentase puskesmas dengan dengan capaian ASPAK di atas 70%	Persen	60	60	60	8.143.639.000	64	8.165.638.000	78	8.569.741.000	92	8.846.211.000	100	8.962.454.000
1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tercapainya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	1	7.030.970.000	1	7.030.970.000	1	7.431.090.000	1	7.687.600.000	1	7.780.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tercapainya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	2	2	2	625.282.000	2	631.211.000	2	631.211.000	2	641.471.000	2	661.494.000
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tercapainya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	1	1	89.930.000	1	90.050.000	1	90.950.000	1	92.950.000	1	93.380.000
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Tercapainya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	7	7	7	56.937.000	7	57.037.000	7	57.400.000	7	57.480.000	8	57.590.000
1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tercapainya Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	37	37	48	340.520.000	55	356.370.000	63	359.090.000	71	366.710.000	78	369.990.000
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	NA	85	88	9.016.617.000	91	10.009.200.000	93	10.706.900.000	95	11.472.900.000	97	12.013.400.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3	3	8.991.417.000	3	9.984.000.000	3	10.681.000.000	3	11.446.500.000	3	11.987.000.000
1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Tercapainya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	12	12	12	25.200.000	12	25.200.000	12	25.900.000	12	26.400.000	12	26.400.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP)	Kasus	5	5	5		5		5		4		4	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang paripurna	Persentase ANC 6 Kali (K6)	Persen	100	100	100	91.250.000	100	92.000.000	100	92.384.000	100	92.992.000	100	93.407.000
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tercapainya Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4305	4305	4331	91.250.000	4357	92.000.000	4383	92.384.000	4409	92.992.000	4435	93.407.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Kematian Balita	Kasus	62	62	60		58		56		54		52	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapat Skrining SHK	Persen	NA	80	82	378.790.000	84	393.640.000	86	400.190.000	88	406.456.000	90	417.191.000
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tercapainya Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3837	3855	3878	264.600.000	3901	273.660.000	3924	279.860.000	3948	284.366.000	3972	294.081.000
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Tercapainya Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16048	16048	16144	114.190.000	16241	119.980.000	16338	120.330.000	16436	122.090.000	16535	123.110.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40		50		60		70		80	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prevalensi Obesitas ≥ 18 Tahun	Persen	NA	25	25	159.800.000	25	172.670.000	25	173.758.000	25	176.062.000	25	177.389.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Tercapainya Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	45000	45836	46294	72.380.000	46757	74.970.000	47224	75.000.000	47697	75.904.000	48174	76.245.000
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tercapainya Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190155	204903	195730	82.820.000	186962	83.900.000	178582	84.258.000	170574	84.958.000	162918	85.244.000
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tercapainya Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14148	6650	6317	4.600.000	6001	13.800.000	5702	14.500.000	5416	15.200.000	5146	15.900.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	Persen	NA	75	77	19.750.000	79	20.300.000	81	20.477.000	83	21.086.000	85	21.199.000
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Tercapainya Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	36283	35139	35669	19.750.000	36156	20.300.000	36517	20.477.000	36883	21.086.000	37252	21.199.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	4.810.000	100	12.890.000	100	12.930.000	100	12.990.000	100	13.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tercapainya Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	62789	65176	62294	4.810.000	59537	12.890.000	56900	12.930.000	54378	12.990.000	51966	13.000.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prevalensi Depresi di Umur ≥ 15 Tahun	Persen	NA	1	1,5	8.410.000	2	16.800.000	2	17.600.000	2	18.500.000	2,5	19.400.000
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Tercapainya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1013	1013	1023	8.410.000	1033	16.800.000	1043	17.600.000	1053	18.500.000	1063	19.400.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ODHIV Baru yang Mendapatkan pengobatan ARV	Persen	75	75	77	24.170.000	79	25.334.000	81	25.979.000	83	26.460.000	85	26.995.000
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tercapainya Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16169	16169	15360	24.170.000	14592	25.334.000	13862	25.979.000	13169	26.460.000	12511	26.995.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	97	97	97	1.314.147.000	98	1.316.369.000	99	1.320.469.000	99	1.324.519.000	99	1.326.359.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	2	2	962.369.000	2	962.369.000	2	962.369.000	2	962.369.000	2	962.369.000
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	301.190.000	2	302.000.000	2	302.900.000	2	303.550.000	2	303.990.000
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	2	2	2	50.588.000	2	52.000.000	2	55.200.000	2	58.600.000	2	60.000.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Desa / Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	NA	3,7	11,11		18,52		25,93		33,33		40,74	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Presentase sarana air minum dengan kualitas air minum memenuhi syarat	Persen	NA	20	26	206.700.000	32	213.130.000	38	221.000.000	44	228.700.000	50	236.000.000
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1	43.770.000	1	48.200.000	1	50.500.000	1	53.000.000	1	55.700.000
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1	128.440.000	1	130.440.000	1	135.500.000	1	140.600.000	1	145.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	1	1	34.490.000	1	34.490.000	1	35.000.000	1	35.100.000	1	35.300.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Angka Keberhasilan Pengobatan TB (IUP)	Persen	91,06	91,1	91,2		91,3		91,4		91,5		91,6	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penemuan Kasus TB (IUP)	Persen	73,06	90	90,5	30.160.000	91	45.200.000	91,5	47.500.000	92	49.800.000	92,5	52.300.000
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tercapainya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9975	5863	5569	30.160.000	5291	45.200.000	5026	47.500.000	4775	49.800.000	4536	52.300.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (IUP)	Persen	98,32	98,43	98,54		98,65		98,76		98,86		99	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	75,07	80	80,7	31.555.545.000	81,4	35.500.000.000	82,1	39.400.000.000	82,8	43.200.000.000	83,5	45.000.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	31.555.545.000	1	35.500.000.000	1	39.400.000.000	1	43.200.000.000	1	45.000.000.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persen	0	75,86	77,59	1.555.751.000	79,31	1.560.800.000	81,03	1.561.400.000	82,76	1.567.400.000	84,48	1.572.200.000
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	1.533.851.000	1	1.538.800.000	1	1.539.400.000	1	1.545.100.000	1	1.549.900.000
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Orang	15	15	15	21.900.000	15	22.000.000	15	22.000.000	15	22.300.000	15	22.300.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Prevalensi Wasting Balita	Persen	8,43	8,18	7,93		7,68		7,43		7,18		6,93	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Prevalensi Underweight Balita	Persen	14,59	11,82	11,57	149.370.000	11,32	179.200.000	11,07	188.200.000	10,82	197.600.000	10,57	207.500.000
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	2	2	2	149.370.000	2	179.200.000	2	188.200.000	2	197.600.000	2	207.500.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	NA	61,6	63,2		66,4		68		70,4		72	
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase puskesmas yang mengirim data resources ke Aplikasi SATUSEHAT di atas 50%	Persen	NA	50	50	22.500.000	60	27.200.000	70	29.900.000	80	32.900.000	90	36.200.000
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	22.500.000	1	27.200.000	1	29.900.000	1	32.900.000	1	36.200.000
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	Persen	100	100	100		100		100		100		100	
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang paripurna	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Persen	80	80	80	72.900.000	82	72.900.000	83	73.000.000	84	73.200.000	85	73.300.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	52	66	67	72.900.000	68	72.900.000	69	73.000.000	70	73.200.000	71	73.300.000
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis yang Selaras dengan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Persen	4,83	4,83	4,85	550.419.000	4,91	556.129.000	4,92	562.429.000	4,94	569.329.000	5,04	576.929.000
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas Dengan SDMK Sesuai Standar	Persen	NA	50	57	57.290.000	64	63.000.000	71	69.300.000	78	76.200.000	85	83.800.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase RS Pemerintah Dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	Persen	NA	37,5	50		62,5		62,5		75		87,5	
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	57.290.000	1	63.000.000	1	69.300.000	1	76.200.000	1	83.800.000
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Dalam Mengikuti Pelatihan	Persen	100	100	100	493.129.000	100	493.129.000	100	493.129.000	100	493.129.000	100	493.129.000
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	NA	101	95	493.129.000	90	493.129.000	85	493.129.000	80	493.129.000	75	493.129.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Mnuman melalui Upaya Pengawasan Sarana Farmasi, Pengendalian dan Pengawasan Industri Rumah Tangga, serta Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Tempat Pengolahan Pangan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah	Persen	NA	80	81,82	492.237.000	83,33	493.594.000	84,62	493.749.000	85,71	494.979.000	86,67	494.980.000
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai dengan persyaratan	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	Persen	80	80	80	47.583.000	82,5	47.594.000	85	47.609.000	87,5	47.629.000	90	47.630.000
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	2	1	1	47.583.000	1	47.594.000	1	47.609.000	1	47.629.000	1	47.630.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	Persen	NA	75	76,92		77,78		78		79,63		80	
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai dengan persyaratan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar	Persen	NA	12,63	21,97	409.064.000	31,31	410.000.000	40,66	410.140.000	50,16	411.140.000	60	411.140.000
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase Sarana IRT yang Memenuhi Ketentuan	Persen	NA	50	54,17		57,5		61,67		65,83		70	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	2	1	1	409.064.000	1	410.000.000	1	410.140.000	1	411.140.000	1	411.140.000
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	Persen	NA	40	46		52		58		64		70	
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengolahan pangan (TPP) yang menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan regulasi	Persen	95,86	95	96	35.590.000	96,5	36.000.000	97	36.000.000	97,5	36.210.000	98	36.210.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	1	35.590.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.210.000	1	36.210.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui Upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor serta Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Presentase Rumah Tangga Sehat	Persen	97,22	97,22	97,3	2.775.831.000	97,4	2.795.070.000	97,5	2.815.110.000	97,6	2.835.210.000	97,7	2.855.270.000
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang paripurna	Proporsi Penduduk Dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	NA	79,65	79,67	2.730.791.000	79,7	2.750.000.000	79,72	2.770.000.000	79,75	2.790.000.000	79,77	2.810.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terpenuhinya Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	2	2	2.730.791.000	2	2.750.000.000	2	2.770.000.000	2	2.790.000.000	2	2.810.000.000
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang paripurna	Persentase Merokok Penduduk 10- 21 Tahun	Persen	NA	9,2	9	45.040.000	8,8	45.070.000	8,6	45.110.000	8,4	45.210.000	8,2	45.270.000
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	3	1	1	45.040.000	1	45.070.000	1	45.110.000	1	45.210.000	1	45.270.000
2. Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai yang ditargetkan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) OPD	indeks	82.79	82.89	82.99		83.09		83.19		83.29		83.39	
2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan capaian Nilai SAKIP OPD sesuai yang ditargetkan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	83,20	83,22	83.24		83.26		83,28		83.30		83.32	



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	67.391.207.000	100	69.541.137.000	100	71.674.482.000	100	72.818.242.000	100	74.970.922.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	22.650.000	100	24.220.000	100	25.850.000	100	27.540.000	100	29.260.000
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	3.734.000	2	3.920.000	2	4.110.000	2	4.320.000	2	4.530.000
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terpenuhinya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	2	2	2	3.916.000	2	4.300.000	2	4.740.000	2	5.220.000	2	5.730.000
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	15	15	15.000.000	15	16.000.000	15	17.000.000	15	18.000.000	15	19.000.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	65.454.977.000	100	67.457.282.000	100	69.459.422.000	100	70.461.702.000	100	72.464.012.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	484	690	715	65.366.432.000	730	67.366.432.000	750	69.366.432.000	770	70.366.432.000	790	72.366.432.000
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	85.315.000	12	87.120.000	12	88.760.000	12	90.540.000	12	92.350.000
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	3.230.000	1	3.730.000	1	4.230.000	1	4.730.000	1	5.230.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	6.500.000	100	7.000.000
X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	100	274.780.000	100	336.165.000	100	372.530.000	100	411.100.000	100	446.900.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	3.650.000	4	3.850.000	4	4.000.000	4	4.200.000	4	4.400.000
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	110.000.000	4	120.000.000	4	135.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	4	5.480.000	4	6.000.000	4	6.630.000	4	7.300.000	4	8.000.000
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	64.420.000	4	70.800.000	4	77.900.000	4	85.700.000	4	94.300.000
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	13	13	14.600.000	13	16.000.000	13	17.600.000	13	19.400.000	13	21.300.000
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terpenuhinya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	1.300.000	2	1.400.000	2	1.500.000	2	1.600.000	2	1.700.000
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	274	280	280	75.330.000	280	118.115.000	285	129.900.000	290	142.900.000	290	157.200.000
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	1.173.455.000	100	1.214.970.000	100	1.259.180.000	100	1.304.600.000	100	1.353.250.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	440.000	1	470.000	1	480.000	1	500.000	1	550.000
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	625.383.000	12	656.000.000	12	689.000.000	12	723.000.000	12	760.000.000
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	547.632.000	12	558.500.000	12	569.700.000	12	581.100.000	12	592.700.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pengadaan/pe meliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	460.345.000	100	503.000.000	100	551.500.000	100	606.800.000	100	670.500.000
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	30	30	163.520.000	30	166.700.000	35	170.000.000	35	173.500.000	35	178.000.000
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	3	2	2	246.975.000	2	284.000.000	3	326.600.000	3	375.600.000	3	432.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	91	62	70	49.850.000	70	52.300.000	74	54.900.000	77	57.700.000	84	60.500.000
RSUD BENDAN															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan melalui Penyediaan Fasilitas, Penyediaan Layanan, dan Peningkatan Mutu Pelayanan di RSUD Bendan	Presentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	86,5	86,5	87	15.040.980.000	87.5	15.860.500.000	88	15.871.500.000	88.5	15.882.500.000	89	15.893.500.000
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di RSUD Bendan	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persen	100	100	100	15.000.000.000	100	15.760.000.000	100	15.770.000.000	100	15.780.000.000	100	15.790.000.000
1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terpenuhinya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	unit	1	1	0	-	1	760.000.000	1	770.000.000	1	780.000.000	1	790.000.000
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	30	30	30	9.900.000.000	30	9.900.000.000	30	9.900.000.000	30	9.900.000.000	30	9.900.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Terpenuhinya rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	3	3	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000	3	5.100.000.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di RSUD Bendan	Presentase layanan RS tipe C	persen	100	100	100	17.210.000	100	18.000.000	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terpenuhinya Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	665	665	520	17.210.000	540	18.000.000	560	19.000.000	580	20.000.000	600	21.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di RSUD Bendan	Persentase capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Rumah Sakit	persen	100	100	75	23.770.000	75	82.500.000	75	82.500.000	75	82.500.000	75	82.500.000
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terpenuhinya Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	27	27	9	23.770.000	9	82.500.000	9	82.500.000	9	82.500.000	9	82.500.000
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis yang Selaras dengan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Bendan	Presentase tenaga kesehatan (Perawat) di Area Kritis (IBS, ICU/PICU/NICU, Dialisis) RSUD Bendan yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	71,19	71,19	77,97	58.163.000	84,75	71.021.000	89,83	72.021.000	94,92	73.021.000	100	74.021.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota di RSUD Bendan	Persentase tenaga kesehatan yang terkredensial	persen	100	100	100	38.713.000	100	51.571.000	100	52.571.000	100	53.571.000	100	54.571.000
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	0	-	451	38.571.000	451	38.571.000	451	38.571.000	451	38.571.000
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	2	2	2	38.713.000	2	13.000.000	2	14.000.000	2	15.000.000	2	16.000.000
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di RSUD Bendan	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	persen	20	20	40	19.450.000	40	19.450.000	45	19.450.000	50	19.450.000	55	19.450.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	84	84	250	19.450.000	250	19.450.000	250	19.450.000	250	19.450.000	250	19.450.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui perencanaan yang selaras, pelayanan administrasi yang andal, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel di RSUD Bendan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	104.062.826.000	100	106.103.112.000	100	107.743.768.000	100	109.824.424.000	100	111.895.080.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	100	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	2	2	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000	10	8.000.000
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel di RSUD Bendan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	49.300.000	100	49.300.000	100	49.300.000	100	49.300.000	100	49.300.000
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000	12	47.800.000
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang transparan dan akuntabel di RSUD Bendan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	1.526.000	100	1.812.000	100	2.468.000	100	3.124.000	100	3.780.000
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	paket	2	2	2	1.526.000	2	1.812.000	3	2.468.000	4	3.124.000	5	3.780.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Presentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	100		100		100		100		100	
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di RSUD Bendan	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	persen	100	100	100	104.000.000.000	100	106.040.000.000	100	107.680.000.000	100	109.760.000.000	100	111.830.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit	1	1	1	104.000.000.000	1	106.040.000.000	1	107.680.000.000	1	109.760.000.000	1	111.830.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PUSKESMAS BENDAN															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30,00	40,00	686.238.000	50,00	686.238.000	60,00	686.238.000	70,00	686.238.000	80,00	686.238.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Bendan	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	686.238.000	100	686.238.000	100	686.238.000	100	686.238.000	100	686.238.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	686.238.000	4	686.238.000	4	686.238.000	4	686.238.000	4	686.238.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	2.750.000.000	100	2.780.000.000	100	2.810.000.000	100	2.830.000.000	100	2.850.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Bendan	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	2.750.000.000	100	2.780.000.000	100	2.810.000.000	100	2.830.000.000	100	2.850.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.750.000.000	1	2.780.000.000	1	2.810.000.000	1	2.830.000.000	1	2.850.000.000
PUSKESMAS KRAMATSARI															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	602.121.000	50	602.121.000	60	602.121.000	70	602.121.000	80	602.121.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Kramatsari	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	602.121.000	100	602.121.000	100	602.121.000	100	602.121.000	100	602.121.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	602.121.000	4	602.121.000	4	602.121.000	4	602.121.000	4	602.121.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.070.000.000	100	1.090.000.000	100	1.110.000.000	100	1.130.000.000	100	1.150.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Kramatsari	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.070.000.000	100	1.090.000.000	100	1.110.000.000	100	1.130.000.000	100	1.150.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.070.000.000	1	1.090.000.000	1	1.110.000.000	1	1.130.000.000	1	1.150.000.000
PUSKESMAS TIRTO															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	739.203.000	50	739.203.000	60	739.203.000	70	739.203.000	80	739.203.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Tirto	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	739.203.000	100	739.203.000	100	739.203.000	100	739.203.000	100	739.203.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	739.203.000	4	739.203.000	4	739.203.000	4	739.203.000	4	739.203.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.450.000.000	100	1.500.000.000	100	1.550.000.000	100	1.600.000.000	100	1.650.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Tirto	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.450.000.000	100	1.500.000.000	100	1.550.000.000	100	1.600.000.000	100	1.650.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.450.000.000	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.600.000.000	1	1.650.000.000
PUSKESMAS MEDONO															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	724.061.000	50	724.061.000	60	724.061.000	70	724.061.000	80	724.061.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Medono	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	724.061.000	100	724.061.000	100	724.061.000	100	724.061.000	100	724.061.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	724.061.000	4	724.061.000	4	724.061.000	4	724.061.000	4	724.061.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.050.000.000	100	1.190.000.000	100	1.240.000.000	100	1.290.000.000	100	1.340.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Medono	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.050.000.000	100	1.190.000.000	100	1.240.000.000	100	1.290.000.000	100	1.340.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.050.000.000	1	1.190.000.000	1	1.240.000.000	1	1.290.000.000	1	1.340.000.000
PUSKESMAS NOYONTAAN															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	454.369.000	50	454.369.000	60	454.369.000	70	454.369.000	80	454.369.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Noyontaan	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	454.369.000	100	454.369.000	100	454.369.000	100	454.369.000	100	454.369.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	454.369.000	4	454.369.000	4	454.369.000	4	454.369.000	4	454.369.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.140.000.000	100	1.282.915.000	100	1.356.502.000	100	1.429.970.000	100	1.503.437.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Noyontaan	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.140.000.000	100	1.282.915.000	100	1.356.502.000	100	1.429.970.000	100	1.503.437.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.140.000.000	1	1.282.915.000	1	1.356.502.000	1	1.429.970.000	1	1.503.437.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PUSKESMAS TONDANO															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	580.197.000	50	580.197.000	60	580.197.000	70	580.197.000	80	580.197.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Tondano	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	580.197.000	100	580.197.000	100	580.197.000	100	580.197.000	100	580.197.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	580.197.000	4	580.197.000	4	580.197.000	4	580.197.000	4	580.197.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.075.000.000	100	1.194.208.000	100	1.204.208.000	100	1.214.208.000	100	1.224.208.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Tondano	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.075.000.000	100	1.194.208.000	100	1.204.208.000	100	1.214.208.000	100	1.224.208.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.075.000.000	1	1.194.208.000	1	1.204.208.000	1	1.214.208.000	1	1.224.208.000
PUSKESMAS KLEGO															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	664.413.000	50	664.413.000	60	664.413.000	70	664.413.000	80	664.413.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Klego	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	664.413.000	100	664.413.000	100	664.413.000	100	664.413.000	100	664.413.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	664.413.000	4	664.413.000	4	664.413.000	4	664.413.000	4	664.413.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.000.000.000	100	1.106.090.000	100	1.150.664.000	100	1.195.118.000	100	1.239.573.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Klego	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.000.000.000	100	1.106.090.000	100	1.150.664.000	100	1.195.118.000	100	1.239.573.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.000.000.000	1	1.106.090.000	1	1.150.664.000	1	1.195.118.000	1	1.239.573.000
PUSKESMAS SOKOREJO															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	586.075.000	50	586.075.000	60	586.075.000	70	586.075.000	80	586.075.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Sokorejo	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	586.075.000	100	586.075.000	100	586.075.000	100	586.075.000	100	586.075.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	586.075.000	4	586.075.000	4	586.075.000	4	586.075.000	4	586.075.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.973.375.000	100	2.117.462.000	100	2.261.548.000	100	2.405.635.000	100	2.549.721.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Sokorejo	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.973.375.000	100	2.117.462.000	100	2.261.548.000	100	2.405.635.000	100	2.549.721.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.973.375.000	1	2.117.462.000	1	2.261.548.000	1	2.405.635.000	1	2.549.721.000
PUSKESMAS DUKUH															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	557.460.000	50	557.460.000	60	557.460.000	70	557.460.000	80	557.460.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Dukuh	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	557.460.000	100	557.460.000	100	557.460.000	100	557.460.000	100	557.460.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	557.460.000	4	557.460.000	4	557.460.000	4	557.460.000	4	557.460.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.250.000.000	100	1.300.000.000	100	1.325.000.000	100	1.350.000.000	100	1.375.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Dukuh	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.250.000.000	100	1.300.000.000	100	1.325.000.000	100	1.350.000.000	100	1.375.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.250.000.000	1	1.300.000.000	1	1.325.000.000	1	1.350.000.000	1	1.375.000.000
PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	473.675.000	50	473.675.000	60	473.675.000	70	473.675.000	80	473.675.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Krapyak Kidul	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	473.675.000	100	473.675.000	100	473.675.000	100	473.675.000	100	473.675.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	473.675.000	4	473.675.000	4	473.675.000	4	473.675.000	4	473.675.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.630.000.000	100	1.759.350.000	100	1.812.130.000	100	1.866.300.000	100	1.922.400.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Krapyak Kidul	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.630.000.000	100	1.759.350.000	100	1.812.130.000	100	1.866.300.000	100	1.922.400.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.630.000.000	1	1.759.350.000	1	1.812.130.000	1	1.866.300.000	1	1.922.400.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PUSKESMAS KUSUMA BANGSA															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	688.556.000	50	688.556.000	60	688.556.000	70	688.556.000	80	688.556.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Kusuma Bangsa	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	688.556.000	100	688.556.000	100	688.556.000	100	688.556.000	100	688.556.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	688.556.000	4	688.556.000	4	688.556.000	4	688.556.000	4	688.556.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	2.170.750.000	100	2.310.936.000	100	2.318.359.000	100	2.325.781.000	100	2.333.204.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Kusuma Bangsa	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	2.170.750.000	100	2.310.936.000	100	2.318.359.000	100	2.325.781.000	100	2.333.204.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.170.750.000	1	2.310.936.000	1	2.318.359.000	1	2.325.781.000	1	2.333.204.000
PUSKESMAS JENGGOT															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	564.942.000	50	564.942.000	60	564.942.000	70	564.942.000	80	564.942.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Jenggot	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	564.942.000	100	564.942.000	100	564.942.000	100	564.942.000	100	564.942.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	564.942.000	4	564.942.000	4	564.942.000	4	564.942.000	4	564.942.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.650.000.000	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	1.800.000.000	100	1.850.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Jenggot	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.650.000.000	100	1.700.000.000	100	1.750.000.000	100	1.800.000.000	100	1.850.000.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.650.000.000	1	1.700.000.000	1	1.750.000.000	1	1.800.000.000	1	1.850.000.000
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	648.151.000	50	648.151.000	60	648.151.000	70	648.151.000	80	648.151.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Pekalongan Selatan	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	648.151.000	100	648.151.000	100	648.151.000	100	648.151.000	100	648.151.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	648.151.000	4	648.151.000	4	648.151.000	4	648.151.000	4	648.151.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	2.120.000.000	100	2.173.000.000	100	2.227.325.000	100	2.283.008.000	100	2.340.083.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Pekalongan Selatan	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	2.120.000.000	100	2.173.000.000	100	2.227.325.000	100	2.283.008.000	100	2.340.083.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	2.120.000.000	1	2.173.000.000	1	2.227.325.000	1	2.283.008.000	1	2.340.083.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PUSKESMAS BUARAN															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	683.134.000	50	683.134.000	60	683.134.000	70	683.134.000	80	683.134.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Puskesmas Buaran	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat pertama	Persen	100	100	100	683.134.000	100	683.134.000	100	683.134.000	100	683.134.000	100	683.134.000
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4	4	4	683.134.000	4	683.134.000	4	683.134.000	4	683.134.000	4	683.134.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Puskesmas	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	Persen	100	100	100	1.175.000.000	100	1.200.000.000	100	1.225.000.000	100	1.250.000.000	100	1.275.000.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Puskesmas Buaran	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	1.175.000.000	100	1.200.000.000	100	1.225.000.000	100	1.250.000.000	100	1.275.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	1.175.000.000	1	1.200.000.000	1	1.225.000.000	1	1.250.000.000	1	1.275.000.000
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	NA	30	40	233.074.000	50	253.114.000	60	273.114.000	70	293.114.000	80	313.114.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di BPSJ	Persentase layanan BPSJ	Persen	100	100	100	233.074.000	100	253.114.000	100	273.114.000	100	293.114.000	100	313.114.000
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terpenuhinya Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dokumen	4	4	4	233.074.000	4	253.114.000	4	273.114.000	4	293.114.000	4	313.114.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada BPSJ	Persentase ketersediaan layanan BLUD	Persen	100	100	100	220.000.000	100	226.600.000	100	233.400.000	100	240.400.000	100	247.600.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di BPSJ	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	Persen	100	100	100	220.000.000	100	226.600.000	100	233.400.000	100	240.400.000	100	247.600.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit	1	1	1	220.000.000	1	226.600.000	1	233.400.000	1	240.400.000	1	247.600.000
LABKESDA															
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Layanan Kesehatan yang Paripurna	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	79,45	79,5	79.6	720.643.000	79.7	737.726.000	79.8	755.247.000	79.9	773.404.000	80	792.009.000
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Labkesda	Persentase capaian ASPAK Labkesda	Persen	60	60	60	89.930.000	62	94.426.000	64	99.147.000	68	104.104.000	70	109.309.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME / OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
						2026		2027		2028		2029		2030	
				2024	2025	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit	1	1	1	89.930.000	1	94.426.000	1	99.147.000	1	104.104.000	1	109.309.000
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Labkesda	Persentase layanan Labkesda	Persen	100	100	100	630.713.000	100	643.300.000	100	656.100.000	100	669.300.000	100	682.700.000
1.02.02.2.02.0034 Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	1	630.713.000	1	643.300.000	1	656.100.000	1	669.300.000	1	682.700.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memperkuat kualitas dan efisiensi pelayanan publik pada Labkesda	Persentase Ketersediaan Layanan BLUD	persen	100	100	100	460.000.000	100	483.000.000	100	507.150.000	100	532.500.000	100	559.125.000
X.XX.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan BLUD di Labkesda	Persentase ketercapaian peningkatan pelayanan BLUD	persen	100	100	100	460.000.000	100	483.000.000	100	507.150.000	100	532.500.000	100	559.125.000
X.XX.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Dokumen	1	1	1	460.000.000	1	483.000.000	1	507.150.000	1	532.500.000	1	559.125.000



4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel IV-2

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jaminan Kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan (berobat cukup bawa KTP)	Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Penyediaan Fasilitas, Penyediaan Layanan, Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Paripurna	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
2	Peningkatan bantuan operasional	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Program: Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	posyandu	Kesehatan melalui Upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor serta Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota		
			Kegiatan: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
3	Beasiswa studi lanjut bagi tenaga Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis yang Selaras dengan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kesehatan di Wilayah Kab/Kota		
			Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	



4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama Pembangunan

Tabel IV-3

Indikator Utama Pembangunan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (IUP)	tahun	74,79	74,86	75,08	75,3	75,51	75,73	75,95	
2	Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP)	kasus	5	5	5	5	5	4	4	
3	Prevalensi Stunting (IUP)	persen	19,3	18,44	17,58	16,72	15,86	15,00	14,14	
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (IUP)	persen	73,06	90,0	90,5	91,0	91,5	92,0	92,5	
5	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP)	persen	91,06	91,1	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	persen	98,32	98,43	98,54	98,65	98,76	98,86	99,00	



4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

Tabel IV-4

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase ketercapaian SPM Kesehatan	persen	97,80	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	NA	54,05	54,05	54,05	64,86	64,86	75,68	
3	Prevalensi Stunting (IUP)	persen	19,3	18,44	17,58	16,72	15,86	15,00	14,14	
4	Nilai SAKIP OPD	nilai	83,20	83,22	83,24	83,26	83,28	83,30	83,32	



4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel IV-5

Indikator Kinerja Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	rasio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	99,53	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	90,35	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	98,64	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	81,68	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	



4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6

Indikator Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	persen	99,53	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	90,35	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	98,64	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	persen	81,68	100	100	100	100	100	100	



No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pelayanan kesehatan sesuai standar									
9	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	



4.8 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 yang mendukung Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

Tabel IV-7

Indikator SDG's

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	persen	82,36	100	100	100	100	100	100	
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	persen	98,32	98,43	98,54	98,65	98,76	98,86	99	
3	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	7,34	7,31	7,28	7,25	7,22	7,19	7,16	
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	persen	5,5	5,47	5,44	5,41	5,38	5,35	5,32	
5	Prevalensi anemia pada ibu hamil	persen	11,59	11,59	11,42	11,24	11,06	10,88	10,82	
6	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	72,07	72,07	75,57	79,07	82,57	86,07	89,57	
7	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	persen	14,59	11,82	11,57	11,32	11,07	10,82	10,57	
8	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	81,68	91	91,2	91,3	91,4	91,5	91,6	
9	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	persen	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	



No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	puskesmas	100	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	98,32	98,43	98,54	98,65	98,76	98,86	99	
12	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	persen	4,83	4,83	4,85	4,91	4,92	4,94	5,04	
14	Jumlah kasus kematian Ibu (proxy)	jiwa	5	5	5	5	5	4	4	
15	Jumlah kasus kronis filariasis (Proxy)	Kasus/jiwa	0	0	0	0	0	0	0	
16	Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk (Proxy)	persen	1,1	1,1	1,37	0,85	0,79	0,72	0,63	
17	Jumlah kasus Hepatitis B	kasus	22	21	20	19	18	17	16	
18	Kejadian Malaria per 1000 orang	orang	0	0	0	0	0	0	0	
19	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 10.000 penduduk	kasus	321,47	441,2	367,76	314,32	275,78	246,63	224,25	
20	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	persen	0,67	0,53	0,52	0,51	0,51	0,5	0,5	
21	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	100	100	100	100	100	100	100	
22	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	10,89	10,89	10,31	10,19	9,93	9,62	9,56	
23	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	per 100.000 penduduk	43	35	30	27	25	23	20	



No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun					Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Angka Kematian Ibu (AKI).	Per 100.000 KH	129,7	129,7	128,93	128,17	127,42	101,32	100,7	
25	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	
26	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	19,02	16,08	15,47	14,86	14,18	13,67	13,09	
27	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	persen	86,12	86,5	87	87,5	88	88,5	89	
28	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	kelurahan	27	27	27	27	27	27	27	
29	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	kelurahan	27	27	27	27	27	27	27	
30	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	persen	86,12	86,5	87	87,5	88	88,5	89	
31	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	persen	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
32	Persentase alokasi anggaran daerah untuk infrastruktur (baru/renovasi) yang mendukung layanan SDGs - BIDANG KESEHATAN	persen	0,08	0,09	0,09	0,1	0,1	0,11	0,11	



Tabel IV-8
Indikator Stunting

No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)	Persen	85	85	86	87	88	90	90
2	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	Persen	90	90	92	94	96	100	100
3	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil	Persen	NA	90	92	94	96	100	100
4	Pemeriksaan kehamilan 6 kali selama masa kehamilan	Persen	80	80	82	85	88	90	90
5	Praktik Inisiasi Menyusui Dini	Persen	75	75	80	85	90	95	95
6	Anak usia 0-5 bulan mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif	Persen	73	73	76	79	82	85	85
7	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) beragam	Persen	73	73	76	79	82	85	85
8	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat air susu ibu (ASI)	Persen	NA	73	76	79	82	85	85
9	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persen	70	70	75	80	85	90	90
11	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	65	65	70	75	80	85	85
12	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan imunisasi rutin lengkap	Persen	96	98	98	98	98	98	99
13	Anak usia 0-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	Persen	85	85	85	85	85	85	85
14	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapat tatalaksana gizi buruk	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan	Persen	70	70	75	80	85	90	90
16	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	65	65	70	75	80	85	85
17	Anak usia 24-59 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar	Persen	85	85	85	85	85	85	85



No	Indikator	Satuan	Baseline		Target Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Jumlah temuan kasus pneumonia pada anak usia 24-59 bulan	Persen	95	95	95	95	95	95	95
19	Anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat-obat cacing/Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan	Persen	99	99	99	99	99	99	99
20	Konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri	Persen	75	75	80	85	90	90	95
21	Skrining anemia terhadap remaja putri	Persen	85	85	85	90	90	95	95
22	Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	98,32	98,43	98,54	98,65	98,76	98,86	99
23	Persentase akses terhadap air minum aman	Persen	20,95	20,95	30	30	30	30	30
24	Calon pengantin yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Persen	42,90	50	55	60	65	70	70



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ini disusun dalam upaya mencapai tujuan Program Pembangunan Kota Pekalongan di Bidang Kesehatan periode waktu tahun 2025-2029. Rumusan Strategi dan Program yang telah dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi unit-unit kerja dalam jajaran Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

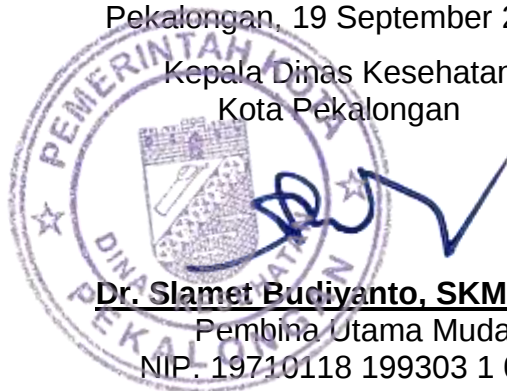
Keterlibatan jajaran unsur Kesehatan di Kota Pekalongan dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi merupakan modal yang paling penting sehingga tidak hanya sekedar memiliki Visi dan Misi akan tetapi bagaimana visi dan misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan nyata untuk mendukung pembangunan kesehatan di Kota Pekalongan.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahunan selama kurun waktu 2025-2029.

Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga perencanaan strategis yang disusun dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan 2025-2029, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Pekalongan, 19 September 2025

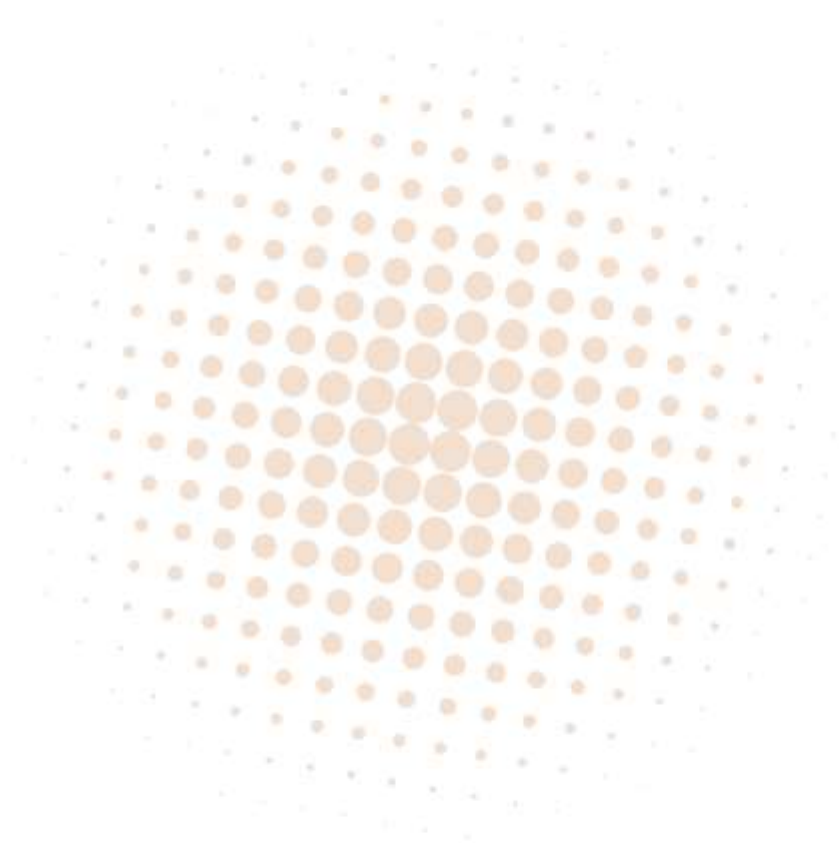
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan



Dr. Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 199303 1 005



Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
II. Jatayu No.4 Kota Pekalongan 51114, Telp. (0285) 421972
dinkes_ktpekalongan@yahoo.com / dinkes@pekalongankota.go.id

